



**KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH
DI KOTA PROBOLINGGO**

*The Implementation's Performance of Waste Banks Program
in Probolinggo City*

SKRIPSI

Oleh

**Muktiar Reza Kumara Putra
NIM 150910201042**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH
DI KOTA PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan
mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Muktiar Reza Kumara Putra
NIM 150910201042**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ayah Sutrisno dan Ibu Wira yang telah memberikan segalanya sehingga mampu melewati semua kesulitan dan mencapai tahap akhir skripsi ini;
2. Kakek, Nenek, adik-adik serta saudara yang telah memotivasi, mendukung, dan mendoakan dalam proses pengerjaan hingga selesainya skripsi ini;
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah sabar mendidik dan memberikan ilmu kepada saya;
4. Dosen-Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, terutama Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah membimbing dan membantu saya dalam belajar, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya;
5. Orang-orang tercinta dan terkasih yang telah membantu penulis selama penelitian hingga terselesaikannya karya tulis skripsi ini.

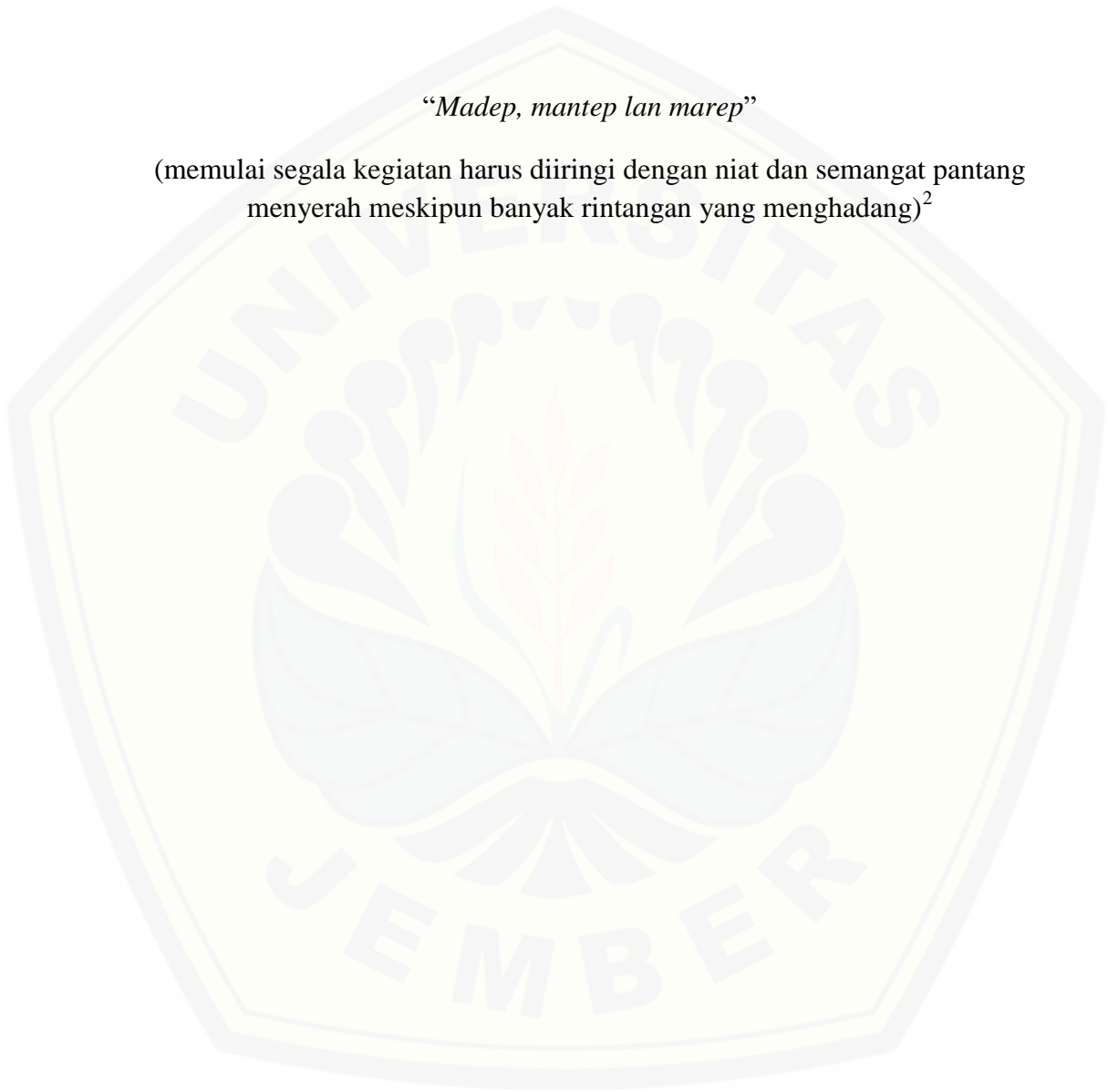
MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(terjemahan surat Al-Insyirah ayat 6)¹

“Madep, mantep lan marep”

(memulai segala kegiatan harus diiringi dengan niat dan semangat pantang menyerah meskipun banyak rintangan yang menghadang)²



¹ Departemen Agama Republik Indonesia.2006. Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Juz: 1-30. Kudus: Menara Kudus

² Filosofi Jawa.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muktiar Reza Kumara Putra

NIM : 150910201042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kinerja Implementasi Program Bank Sampah di Kota Probolinggo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, terkecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Maret 2020

Yang menyatakan,

Muktiar Reza Kumara Putra
NIM 150910201042

PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH
DI KOTA PROBOLINGGO**

Oleh

Muktiar Reza Kumara Putra
NIM 150910201042

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Nian Riawati, S.Sos., MPA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kinerja Implementasi Program Bank Sampah di Kota Probolinggo” karya Muktiar Reza Kumara Putra telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jum’at, 13 Maret 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Anggota I,

Drs. Anwar, M.Si
NIP. 196306061988021001

Dr. Sutomo, M.Si
NIP. 196503121991031003

Anggota II,

Anggota III,

Nian Riawati, S.Sos., M.PA
NIP. 198506092015042002

Muhammad Hadi Makmur, S.Sos., M.AP
NIP. 197410072000121001

Mengesahkan
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

Kinerja Implementasi Program Bank Sampah di Kota Probolinggo; Muktiar Reza Kumara Putra, 150910201042; 2019; 151 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sampah merupakan limbah padat sisa dari kegiatan manusia yang berdampak langsung pada kehidupan manusia umumnya menjadi permasalahan yang pelik di daerah perkotaan. TPA menjadi tempat terakhir dari alur sampah yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya bahkan TPA mengalami *overload*. Permasalahan tersebut dibutuhkan langkah preventif oleh masyarakat secara luas melalui pengelolaan sampah yang tepat dan berwawasan lingkungan guna mampu menekan angka timbulan sampah serta dampak negatif yang ditimbulkan. Bank sampah merupakan alternatif konsep pengelolaan sampah dengan mengadopsi sistem perbankan, konsep menabung sampah.

Bank sampah difokuskan dalam pengelolaan sampah yang ditujukan kepada pemberdayaan masyarakat yang menciptakan rekayasa sosial. Sampah yang ditabung kemudian dikelola sedemikian rupa (daur ulang dan/atau digunakan ulang) oleh masyarakat sehingga memiliki nilai ekonomis. Hal tersebut dicantumkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2012 yang kemudian diturunkan dan diterapkan menjadi perda atau peraturan pemerintah tiap daerah sehingga menjadi program pelestarian lingkungan di daerah kota maupun kabupaten, salah satunya kota Probolinggo. Peraturan daerah kota Probolinggo nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Surat Keputusan Walikota Probolinggo nomor 39 tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Pelayanan Bank Sampah Kota sebagai bukti konkrit pemerintah kota Probolinggo dalam memperhatikan lingkungannya terutama pengelolaan sampah melalui bank sampah.

Konteks bank sampah diatas menjadi fokus penelitian oleh peneliti yaitu kinerja implementasi program bank sampah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui metode wawancara terhadap informan

dengan cara bertatap muka serta sumber tertulis seperti dokumen, gambar dan lainnya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive*. Data yang telah didapatkan kemudian dicek keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Data yang lulus cek keabsahan kemudian disajikan dan dianalisis dengan kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program bank sampah kota Probolinggo dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam dua bentuk, yaitu melalui bank sampah induk dikelola UPT PSL Dinas Lingkungan Hidup dan bank sampah unit milik masyarakat. Bank sampah induk menaungi dan melayani 97 bank sampah unit yang tersebar di masyarakat (pokmas dan sekolah) serta 116 nasabah individu yang menabung. Adapun layanan yang ditawarkan dalam pemenuhan kebutuhan meliputi sosialisasi dan pelatihan; jasa angkut sampah via *mobile service*; serta berbagai jenis tabungan untuk nasabah.

Pada penjelasan selanjutnya, sejumlah 97 bank sampah induk diantaranya 72 bank sampah unit kelompok masyarakat memiliki hasil berbeda (status aktif dan tidak aktif) yang berdampak langsung pada potensi serta manfaat yang dihasilkan. Hal tersebut juga tidak terlepas karakter dari masyarakat yang menjadi sasaran (*target group*) dari program. Kemudian karakter tersebut berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat terhadap program tersebut.

Bank sampah Srikandi yang masih tergolong aktif dan berkembang sampai saat ini. Bank sampah Srikandi terletak pada kampung tematik daur ulang “ReReRe” perum Kopian Barat kota Probolinggo yang saat ini masih beroperasi sebagai industri kerajinan daur ulang IKM UD Srikandi, memiliki konsep bank sampah pada umumnya yaitu pemberdayaan masyarakat meliputi ibu-ibu rumah tangga dan kepala keluarga wanita/janda setempat menjadi pengelola; pemulung sebagai tenaga memilah sampah warga; dan gotong royong warga sekitar dalam memanfaatkan sampah sebagai hiasan kampung. Berbagai manfaat telah dicapai melalui dukungan lapisan masyarakat tersebut sehingga usahanya berkembang dan terkenal sampai luar wilayah kota Probolinggo.

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kinerja Implementasi Program Bank Sampah di Kota Probolinggo”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Nian Riawati, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Ayahanda Sutrisno, Ibunda Wira serta adik-adik yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
9. Papa Giyatono, Mama Rohantun dan lainnya yang telah memberikan dorongan, doa dan bantuannya ketika penulis di Jember;

10. Rosalita Gita Purnama, terkhusus yang telah memberikan doa, semangat, bantuan dan waktunya untuk saling berbagi ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini;
11. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ir. Budi Krisyanto, M.Si beserta aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup yang telah berkenan memberikan kesempatan dan waktunya dalam membantu penulis selama penelitian;
12. Ibu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah, Robiatul Adawiyah, S.E yang telah berkenan memberikan bantuan dan informasi data kepada penulis selama penelitian;
13. Ibu Katarina Suhendar Triningrum beserta suami yang telah berkenan meluangkan waktu dan informasi data kepada penulis selama penelitian;
14. Sahabat sehoobi dan senasib, Fakhruddin Akhmad dan MZ Harmaffie Contessa F, yang telah memberikan bantuan tenaga serta pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini;
15. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2015. Terimakasih telah memberikan pembelajaran selama ini;
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 13 Maret 2020

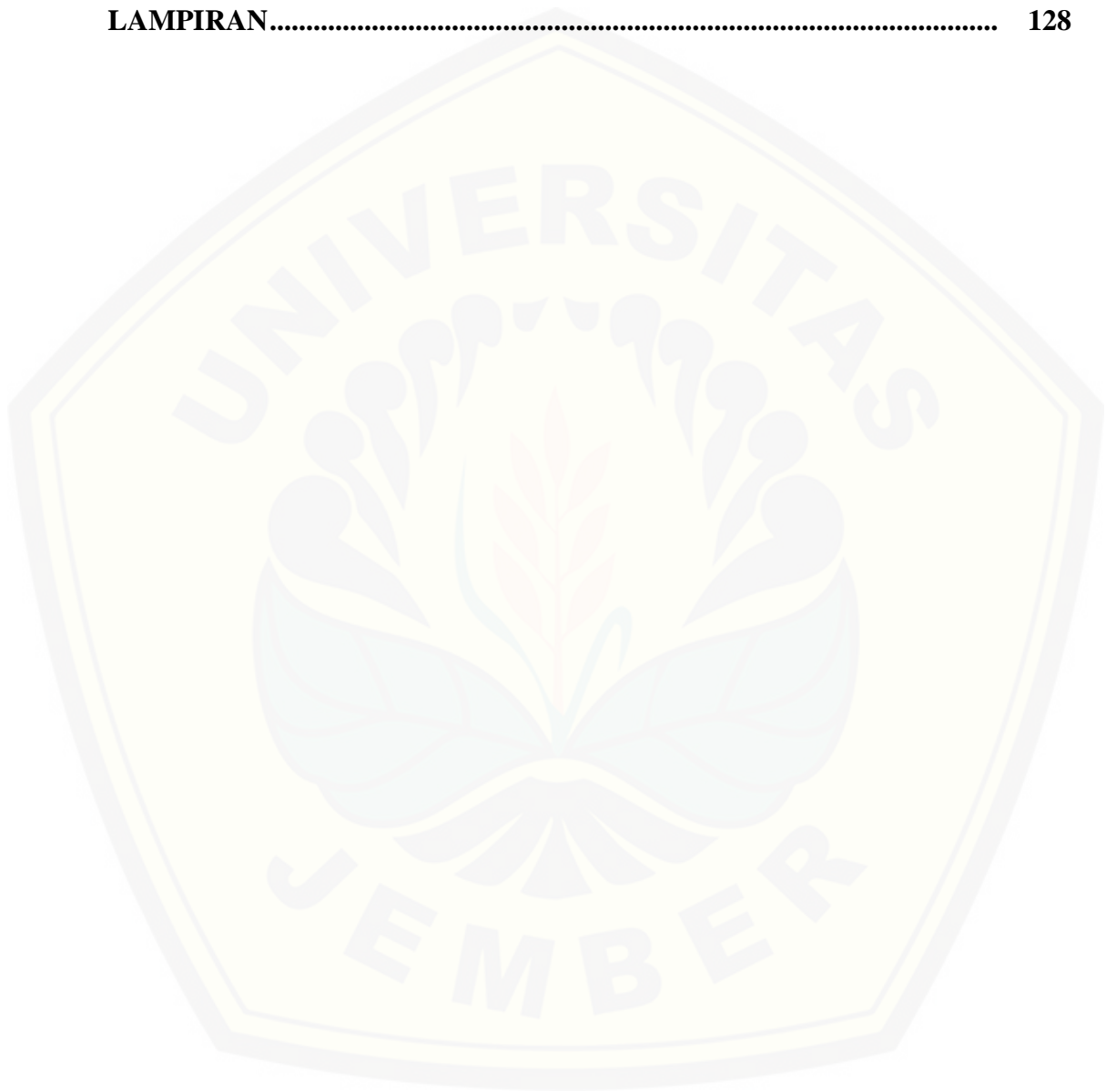
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kebijakan Publik	14
2.1.1 Bentuk Kebijakan Publik	16
2.1.2 Mekanisme Kebijakan Publik	18
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	18
2.3 Kinerja Implementasi Kebijakan	22
2.3.1 Indikator Pengukuran Kinerja.....	25
2.4 Pengelolaan Sampah	30
2.4.1 Program Bank Sampah.....	32
2.4.2 Partisipasi Aktif.....	33

2.5	Penelitian Terdahulu.....	35
2.6	Kerangka Berfikir	39
BAB 3.	METODE PENELITIAN.....	40
3.1	Pendekatan Penelitian.....	40
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	41
3.3	Situasi Sosial.....	42
3.4	Desain Penelitian	43
3.4.1	Fokus Penelitian.....	43
3.4.2	Penentuan Informan Penelitian	44
3.4.3	Data dan Sumber Data	45
3.5	Teknik dan Alat Perolehan Data.....	46
3.6	Teknik Menguji Keabsahan Data	48
3.7	Teknik Penyajian Data dan Analisis Data	49
Bab 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1	Gambaran Umum.....	52
4.1.1	Gambaran Umum Kota Probolinggo	52
4.1.2	Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Probolinggo.....	54
4.1.3	Gambaran Umum Permasalahan Persampahan kota Probolinggo.....	59
4.1.4	Pengelolaan Sampah kota Probolinggo.....	62
4.2	Penyajian Hasil Penelitian.....	70
4.2.1	Program Bank Sampah Kota Probolinggo Sebagai Bentuk Alternatif Solusi Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan	71
4.2.2	Program Bank Sampah melalui Bank Sampah Induk menggerakkan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	75
4.3	Analisis Hasil Penelitian.....	96
4.3.1	Analisis implementasi program bank sampah	97
4.3.2	Analisis hasil implementasi kebijakan program bank sampah	101

BAB 5. PENUTUP	121
5.1 Kesimpulan	121
5.2 Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN	128



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Timbulan Sampah TPA kota Probolinggo tahun 2018	6
Tabel 1.2 Jumlah penduduk Kota Probolinggo tahun 2014-2017	7
Tabel 2.1 Indikator Keluaran Kebijakan (Policy Output)	28
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan menurut Kecamatan di Kota Probolinggo 2010, 2017, dan 2018	53
Tabel 4.2 Jumlah penduduk dan jumlah volume sampah TPA kota Probolinggo berdasarkan tahun 2014 - 2018	60
Tabel 4.3 Analisis jumlah timbulan sampah TPA kota Pprobolinggo berdasarkan sumber pemasok sampah tahun 2018	61
Tabel 4.4 Sarana angkut sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	66
Tabel 4.5 Jumlah sampah TPA berdasarkan jenis sarana angkut dan bulan pada tahun 2019	68
Tabel 4.6 Data nasabah bank sampah induk klasifikasi bank sampah unit milik kelompok masyarakat kota Probolinggo tahun 2019	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	19
Gambar 2.2	Implementasi sebagai <i>Delivery Mechanism Policy Output</i>	20
Gambar 2.3	Kerangka Logis Pengukuran Kinerja Implementasi.....	23
Gambar 2.4	Pengukuran Kinerja Program.....	25
Gambar 2.5	Gambar Kerangka Berpikir.....	39
Gambar 4.1	Peta Kota Probolinggo	52
Gambar 4.2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup kota Probolinggo.....	59
Gambar 4.3	Peta Zona Pengelolaan Sampah berdasarkan Standar Pelayanan Minimum SPM.....	65
Gambar 4.4	Alur mekanisme sampah kota Probolinggo	75
Gambar 4.5	Struktur organisasi bank sampah induk Maspro Mesra kota Probolinggo.....	79
Gambar 4.6	Proses operasional bank sampah induk Maspro Mesra kota Probolinggo.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 6.1	Wawancara kepada Informan (Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Probolinggo beserta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah).....	128
Lampiran 6.2	Observasi bank sampah induk Maspro Mesra kota Probolinggo	128
Lampiran 6.3	Tabungan Bank Sampah Kota Maspro Mesra.....	130
Lampiran 6.4	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Daur Ulang UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah bersama Paguyuban Peduli Sampah yang ditujukan ibu-ibu Rumah Tangga.....	132
Lampiran 6.5	Wawancara bersama Pengelola sekaligus Pengrajin Bank Sampah Srikandi	133
Lampiran 6.6	Buku catatan nasabah bank sampah unit Srikandi	133
Lampiran 6.7	Observasi Produk Daur Ulang Bank Sampah Srikandi.....	134
Lampiran 6.8	Surat Izin Usaha Perdagangan Bank Sampah Srikandi.....	135
Lampiran 6.9	Observasi Kampung Tematik Daur Ulang “ReReRe”, Lokasi Bank Sampah Srikandi	136
Lampiran 6.10	Draft wawancara	137
Lampiran 6.11	Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember...	140
Lampiran 6.12	Surat Izin Penelitian dari Sos. Pol Tingkat II (kota Probolinggo).....	141
Lampiran 6.13	Produk Hukum Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 13 tahun 2012)	143
Lampiran 6.14	Surat Keputusan Tim Pelaksanaan Bank Sampah Induk “Maspro Mesra”	147

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pencapaian program bank sampah terkait kinerja implementasi kebijakan lingkungan di kota Probolinggo melalui program bank sampah. Secara umum kinerja implementasi dalam kebijakan merupakan hal krusial yang cukup dominan dalam pengambilan sebuah keputusan. Hal ini telah digambarkan lebih lanjut, yaitu pencapaian (*output*) dan harapan (*outcome*) pada implementasi yang digambarkan melalui kegiatan-kegiatan administratif secara operasional dilakukan guna mencapai hasil dari program dan kebijakan. Dengan demikian implementasi merupakan alur mekanisme proses dari kebijakan dalam rangka mengatasi masalah, sehingga akan menghasilkan sebuah pencapaian yang turut dipengaruhi faktor tertentu di lapangan terkait bank sampah kota Probolinggo.

Implementasi kebijakan memiliki tahapan proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor penghambat dan pendukung, sehingga turut andil dalam pengambilan keputusan. Secara langsung kinerja memiliki peran utama dalam menentukan pencapaian dan harapan yang telah memasuki tujuan implementasi kebijakan. Pada beberapa bahasan tertentu, jika hasil implementasi kebijakan mampu mencapai harapan hingga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, maka tujuan tersebut dinilai berhasil. Namun jika implementasi kebijakan belum mampu mencapai harapan maka perlu adanya *feedback* seluruh elemen masyarakat terhadap pemerintah sehingga mampu mengoptimalkan hasil kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan patut dinilai berdasarkan proses implementasi beserta hasil yang dicapai selama dilaksanakannya kebijakan.

Pemerintah kota Probolinggo dalam upaya pelestarian lingkungan menggulirkan beberapa program, salah satunya adalah program bank sampah. Program bank sampah termasuk pada kebijakan publik pada bidang pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang yang mempengaruhi kesejahteraan hidup hingga keberlangsungan hidup manusia.

Melalui kebijakan publik terkait lingkungan hidup secara tidak langsung turut mempengaruhi aktivitas serta keberlangsungan sumber daya manusia dan alam. Dengan demikian melalui program bank sampah pemerintahan kota Probolinggo turut berperan dalam menjalankan dan implementasi kebijakan publik setempat terkait lingkungan hidup.

Perkembangan kebijakan publik dan implementasi terkait lingkungan hidup dewasa ini telah memberikan berbagai dampak dalam rencana pembangunan nasional. Sebagai contoh dengan arus urbanisasi dan globalisasi yang cukup merata baik di perkotaan hingga perdesaan telah membuat tingkat konsumsi masyarakat serta kebutuhan industri hingga infrastruktur semakin tinggi. Hal ini kemudian menyebabkan berbagai persoalan kompleks terkait pencemaran lingkungan hidup, sanitasi air buruk, hingga pengelolaan sampah yang kurang memadai. Dengan demikian perkembangan kebijakan publik dan implementasi kebijakan program terkait lingkungan perlu dipikirkan khususnya permasalahan pengelolaan sampah.

Sampah umumnya merupakan limbah padat yang dapat/sukar diuraikan lebih lanjut dari kehidupan manusia. Sampah menjadi salah satu penyebab utama berbagai persoalan masyarakat, seperti kesehatan; bencana alam; hingga lingkungan hidup. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018, jumlah timbunan sampah Indonesia telah mencapai sekitar 65,2 juta ton dengan jumlah penduduk sekitar 261 juta jiwa di tahun 2016. Data BPS terkait Lingkungan Hidup Indonesia merupakan fenomena gunung es, yaitu jumlah timbunan sampah dan jumlah penduduk Indonesia hanya mampu menggambarkan secara umum tidak keseluruhan cakupan data. Seperti yang telah diketahui, proyeksi jumlah penduduk Indonesia diperkirakan terus melonjak dari tahun ke tahun dan secara langsung. Hal ini diperkuat pendapat Sugandhy dalam bukunya (2007) bahwa volume sampah perkotaan terus meningkat seiring dengan meningkatnya populasi penduduk perkotaan. Kecenderungan meningkatnya kebutuhan maka semakin tinggi dengan tingkat konsumsi manusia yang berbanding lurus perkembangan kuantitas serta jenis sampah. Manusia, baik perseorangan; kelompok; hingga komunitas secara

langsung menghasilkan sampah dalam berbagai kegiatan sehari-hari, seperti rumah tangga, perusahaan, perkantoran, sekolah, hingga berbagai akses publik. Dengan demikian sampah sebagai limbah padat memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya, baik kuantitas hingga jenis sampah.

Gelbert dkk (1996:56) telah mengemukakan bahwa sampah dibagi menjadi dua jenis berdasarkan komposisinya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik banyak dihasilkan oleh limbah hayati memiliki sifat *biodegradable* atau mudah diurai melalui proses alami yang sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga; sedangkan sampah anorganik merupakan limbah non-hayati dengan sifat *non biodegradable* yang sebagian besar berasal dari pola konsumsi manusia sekitarnya. Sebagai contoh sampah organik seperti sisa makanan; kotoran hewan; hingga zat hara tumbuhan terutama daun dan batang. Secara umum keseluruhan sampah organik mampu diolah lebih lanjut dan dapat bermanfaat bagi keberlangsungan umat manusia tanpa meninggalkan persoalan lingkungan hidup. Hal ini tentu berbeda dengan sampah anorganik, seperti plastik, logam, kertas, kaca, hingga lainnya dewasa ini telah menjadi persoalan terkait lingkungan hidup, terutama telah mendegradasi kemampuan tanah serta sanitasi air yang buruk bagi sekitar sehingga memunculkan permasalahan sosial cukup pelik dan butuh perhatian khusus seluruh elemen masyarakat.

Persoalan sosial terkait sampah telah banyak dibahas dalam berbagai program dan implementasi, baik lingkungan pemerintah daerah; pemerintah pusat; hingga dunia internasional melalui program *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 12.5. Program SDGs tersebut telah menyatakan bahwa negara secara substansial perlu menangani sampah melalui *prevention; reduce; reuse; recycle*. Hal ini telah sesuai dengan langkah pemerintah pusat yang termuat dalam Peraturan Presiden (PP) nomor 97 tahun 2017 dalam menargetkan pengurangan sampah jenis rumah tangga sebesar 30% dan penanganannya sebesar 70%. Dengan demikian persoalan pelik terkait sampah melalui program dan implementasi SDGs poin 12.5 dan PP nomor 97 tahun 2017 memerlukan pengawalan serta kerjasama berbagai elemen masyarakat.

Pada pengelolaan sampah sesuai dengan implementasi kebijakan pada bahasan sebelumnya, masyarakat umumnya masih menggunakan metode pengelolaan sampah tradisional, yaitu membuang, membakar, dan menimbun. Metode pengelolaan sampah tersebut merupakan teknik sederhana yang masyarakat pada umumnya berulang kali melakukannya, khususnya di lingkup perdesaan. Hanya memerlukan *jugangan* atau galian tanah ukuran 1x1 meter pada kedalaman 1 meter merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat perdesaan dalam pengelolaan sampah. *Jugangan* memiliki peran sebagai tempat sampah atau pembuangan akhir sampah, sehingga masyarakat tidak memerlukan petugas sampah dalam mengangkut ke tempat pembuangan akhir.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan masyarakat perkotaan, dimana setiap rumah tidak memiliki cukup lahan dalam membuat *jugangan*. Pada pengelolaan sampah perkotaan yang menggunakan teknik “kumpul dan angkut” ke tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) banyak dilakukan oleh petugas kebersihan kota. Pengelolaan sampah ini telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 terkait Pengelolaan Sampah. TPA secara umum merupakan tempat pembuangan terakhir dalam proses pengelolaan sampah mulai dari dihasilkan, dikumpulkan, diangkut, dikelola hingga dibuang. Paradigma ini telah banyak dianut di lingkup perkotaan, terutama daerah padat penduduk dan kawasan industri.

Semakin tinggi angka kepadatan penduduk serta kawasan industri yang sebanding dengan kecenderungan meningkatnya timbunan sampah maka mengakibatkan *overload* pada tempat pembuangan akhir. Ketersediaan lahan dalam proses pengelolaan TPA cenderung sulit oleh karena daya dukung lahan kian menurun. Hal tersebut menjadi persoalan lebih lanjut apabila sampah terus menerus diangkut ke TPA tanpa pengelolaan sampah lebih lanjut. Berdasarkan data riset *Sustainable Waste Indonesia* (SWI) telah mengungkapkan sebanyak 24 % sampah Indonesia masih belum dikelola dengan baik, sedangkan 7% sampah daur ulang dan 69% sampah berakhir di TPA di tahun 2018. (dilansir <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425101643-282-293362/riset24-persen-sampah-di-indonesia-masih-tak-terkelola>)

Pengelolaan sampah yang belum dikelola dengan baik dapat mengganggu lingkungan sekitar, seperti bau tidak sedap hingga memunculkan berbagai bibit penyakit. Hal ini kemudian dapat menyebabkan sumber masalah di TPA sebagai tempat terakhir pembuangan sampah sehingga perlu adanya penanganan sampah yang tepat guna mengurangi jumlah serta resiko timbulan sampah. Telah banyak teknik penanganan alternatif dalam mengatasi persoalan tersebut, salah satunya melalui metode 3R (*reduce, reuse, recycle*) khususnya program bank sampah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2012, bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau digunakan ulang sehingga memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan bank sampah telah menggunakan strategi penerapan 3R yang banyak bersumber pada tingkat partisipasi masyarakat. Secara umum penerapan 3R dinilai cukup krusial dan dominan oleh karena masyarakat merupakan objek sekaligus subjek sasaran program. Dengan demikian implementasi kebijakan bank sampah telah menjadi pengelolaan sumber (hulu) sampah lebih lanjut dan tepat guna demi mengurangi dampak yang ditimbulkan sampah.

Prinsip dasar bank sampah secara umum merupakan rekayasa sosial terkait sistem manajerial yang diterapkan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Mekanisme dasar bank sampah yaitu mengajak masyarakat mengumpulkan, memilah hingga menukarkan sampah dengan uang atau jasa yang dapat disimpan sehingga mampu menjalankan implementasi kebijakan tersebut. Pada bahasan lebih lanjut, bank sampah dapat hadir dalam mendaur ulang atau menggunakan kembali sampah sehingga mampu merubah barang yang tidak berharga menjadi memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan sampah yang baik secara langsung dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan demikian prinsip bank sampah sebagai rekayasa sosial dapat memberikan berbagai manfaat langsung pada masyarakat melalui sampah bernilai ekonomis dan lingkungan yang bersih dan sehat.

Potensi bank sampah dalam bingkai ekonomi kerakyatan telah banyak dinilai bermanfaat untuk seluruh elemen masyarakat. Bank sampah telah memberikan *output* nyata dan *riil* dalam membuka kesempatan kerja serta

menjalankan manajemen operasi bank sampah berbasis koperasi kerakyatan melalui investasi tabungan. Pendapat direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati menyatakan bank sampah telah memberikan sumbangsih penting dalam mengurangi sampah nasional sebesar 1,7% atau 1,4 juta ton/tahun dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 1,5 miliar per tahun. Pertumbuhan bank sampah telah mengalami peningkatan cukup drastis dari 1.172 unit tahun 2015 menjadi 5.244 unit pada tahun 2017 yang tersebar di 34 provinsi dan 219 kabupaten/kota Indonesia. Keberadaan bank sampah telah memberikan hasil positif, baik lingkungan, sosial hingga ekonomi kerakyatan. Keseluruhan sumbangsih tersebut merupakan kontribusi serta rekayasa sosial nyata dalam pengurangan sampah nasional dan peluang pekerjaan dalam memberikan penghasilan tambahan. (dilansir <https://news.detik.com/berita/d-4328876/klhk-sebut-bank-sampah-beri-pendapatan-rata-rata-1-m-per-tahun>)

Kota Probolinggo sebagai salah satu dari 219 kabupaten/kota turut melaksanakan program bank sampah. Program bank sampah kota Probolinggo banyak dinilai dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya pengurangan timbulan sampah. Sebagai salah satu kota padat dan sibuk di provinsi Jawa Timur, kota Probolinggo hingga kini belum terlepas dari persoalan sampah. Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup kota Probolinggo, tercatat jumlah timbunan sampah masuk TPA rata-rata 58 ton/hari pada tahun 2018. Berikut disajikan data timbunan sampah TPA Kota Probolinggo 2018 yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Timbulan Sampah TPA kota Probolinggo tahun 2018

No	Pemasok Sampah	Rata-rata Sampah per Hari (Kg)	Volume Sampah dalam setahun (Kg)	Persentase
1	Rumah Tangga	39.779	14.519.296	67,59%
2	Pasar	12.093	4.414.060	20,55%
3	Jalan	3.494	1.275.357	5,94%
4	Taman	187	68.248	0,32%
5	Sungai	417	152.161	0,71%
6	Terminal	899	328.163	1,53%

7	Rumah Sakit	526	191.944	0,89%
8	Hotel	53	19.471	0,09%
9	Restoran	242	88.416	0,41%
10	Industri	1.164	424.975	1,98%
Jumlah		58.854	21.482.091	100,00%

Sumber : Profil Persampahan DLH 2019 (data diolah)

Berdasarkan data tabel diatas, telah diketahui bahwa sumber timbunan sampah yang masuk TPA tahun 2018 sebesar 21,42 juta kg dengan sampah rumah tangga sebagai pemasok terbesar yaitu 67,59% dengan rata-rata 39,8 ribu kg/hari. Intensitas jumlah sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah secara tidak langsung berbanding lurus dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas, dan tingkat konsumsi terhadap barang atau material. Intensitas jumlah sampah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar volume sampah yang turut dihasilkan (Purwendro dan Nurhidayat, 2007:5). Hal ini turut terjadi di kota Probolinggo dimana intensitas jumlah sampah turut diimbangi oleh meningkatnya jumlah penduduk. Berikut disajikan data jumlah penduduk kota Probolinggo tahun 2014-2018 menurut data BPS tahun 2019 yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah penduduk Kota Probolinggo tahun 2014-2017

No	Tahun	Jumlah (jiwa)
1	2014	220.767
2	2015	229.013
3	2016	231.112
4	2017	233.123
5	2018	235.211

Sumber : Kota Probolinggo dalam angka tahun 2019 (data diolah)

Berdasarkan data tabel diatas, telah diketahui bahwa jumlah penduduk kota Probolinggo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk kota Probolinggo tahun 2018 yaitu sebesar 235 ribu jiwa, yaitu meningkat 15 ribu dibandingkan tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kota Probolinggo mengalami berbagai perkembangan pesat, baik segi jumlah penduduk setiap tahunnya hingga kepadatan serta intensitas jumlah sampah.

Masalah sampah yang semakin berkembang di kota Probolinggo, mendesak pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Melalui program bank

sampah ini dinilai mampu dalam memberikan solusi alternatif pada pengelolaan sampah. Bank sampah turut dinilai sebagai media edukasi tentang pengelolaan sampah baik melalui metode 3R. Program bank sampah turut andil sebagai langkah konkrit dalam mengajak masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya. Program bank sampah tersebut memiliki tujuan yaitu membangun tingkat partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan nasional keberlanjutan melalui pengelolaan sampah, menciptakan ekonomi kerakyatan serta lingkungan yang bersih dan sehat.

Peraturan daerah kota Probolinggo nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Surat Keputusan Walikota Probolinggo nomor 39 tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Pelayanan Bank Sampah Kota, menjadi langkah konkrit dalam bentuk regulasi terkait pengelolaan sampah sesuai prinsip bank sampah. Berdasarkan wawancara ibu Robiatul Adawiyah selaku Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pengelola Sampah dan Limbah (UPT PSL), bank sampah dinilai sebagai solusi alternatif dalam mengurangi timbulan sampah dengan harapan kota Probolinggo bebas sampah tahun 2025.

Terkait keputusan pemerintah kota Probolinggo sebagai tindak lanjut dalam rangka mempertahankan predikat adipura kota menengah ke 13 yaitu peningkatan pembentukan bank sampah unit-unit di masyarakat perlu dilakukan. Pemerintah kota beserta Dinas Lingkungan Hidup mengupayakan peningkatan bank sampah unit tersebut melalui langkah *persuasif* yang dibantu mitra kerjanya, Paguyuban Peduli Sampah atau dikenal PAPESA. PAPESA terbentuk dari inisiasi masyarakat dalam rangka mensosialisasikan dan mengedukasi gerakan pengelolaan sampah yang berbasis lingkungan dengan menggunakan konsep bank sampah kepada masyarakat kota Probolinggo. Pada tahun 2018 tercatat jumlah bank sampah unit di kota Probolinggo mencapai 97 unit bank sampah (dengan status aktif dan tidak aktif) yang sebelumnya berjumlah 60 unit pada tahun 2017, terdiri atas para sekolah bergelar adiwiyata; kelompok masyarakat binaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan masyarakat peduli lingkungan.

Bank sampah unit memiliki kekuasaan penuh dalam pengelolaan sampah dan keorgansasian secara mandiri. Sumbangsih DLH yang memosisikan diri

sebagai mitra turut berupa bank sampah induk yang bertugas memenuhi kebutuhan bank sampah unit mulai dari pelatihan, jasa pengangkutan, jasa pengepulan dan pemenuhan perlengkapan turut guna menunjang pengelolaan sampah sebagai wewenang sekaligus menstimulus bagi masyarakat. Dengan demikian, harapannya masyarakat kota Probolinggo sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitar terutamanya terhadap pengelolaan sampah salah satunya melalui bank sampah yang memiliki banyak potensi serta manfaat.

Satu bank sampah unit yang menarik yaitu bank sampah Srikandi berkembang menjadi industri usaha dagang yang mampu menyerap tenaga kerja wanita. Partisipasi warga sekitar juga dibangun melalui gotong royong menginovasi kampung menggunakan sampah dengan konsep daur ulang sehingga dicetuskan kampung tematik ReReRe. Kegiatan-kegiatan tersebut telah mencerminkan metode 3R sekaligus manfaat keberadaan bank sampah bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu contoh bank sampah yang berhasil hingga saat ini masih beroperasi mendaur ulang sampah terkait pengelolaan sampah dilakukan kelompok masyarakat kota Probolinggo.

Berdasarkan uraian diatas peneliti memfokuskan penelitian untuk membahas tentang kinerja program bank sampah meliputi hal implementasi dan hasil program di kota Probolinggo, khususnya bank sampah induk dan bank sampah unit yaitu bank sampah Srikandi. Peneliti memiliki tujuan dalam menggambarkan kondisi riil program bank sampah beserta keadaan kawasan yang menjadi faktor pencapaian program, kemudian hasil tersebut diperbandingkan dan dikaitkan dengan tujuan dan manfaat program bank sampah kota Probolinggo. Dengan demikian hasil analisis tersebut akan berkesinambungan dengan konsep kinerja kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah merupakan suatu kesulitan yang dirasakan, suatu perasaan tidak menyenangkan atas suatu situasi atau gejala tertentu. Masalah penelitian adalah keraguan, kesangsian, kebingungan, atau kemenduaan tentang suatu fenomena yang terjadi (Silalahi 2010: 44). Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah

dijelaskan oleh peneliti maka rumusan masalah ini akan menjadi landasan peneliti untuk melakukan observasi. Pada penelitian ini, peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana kinerja implementasi program terkait pencapaian (*output* dan *outcome*) bank sampah di kota Probolinggo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Selain itu tujuan juga dapat menjadikan peneliti terarah dan tidak keluar dari pembahasan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisa kinerja implementasi dari program bank sampah di Kota Probolinggo khususnya bank sampah induk dan unit milik masyarakat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Secara pribadi, melatih tingkat penalaran dengan mengembangkan dan memperluas wawasan maupun ilmu pengetahuan melalui teori-teori yang didapatkan dalam materi perkuliahan dan fakta sosial atau kondisi nyata di lapangan.
2. Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan suatu referensi baru untuk peneliti yang lain sekiranya memiliki suatu kesamaan pembahasan serta dapat memberikan kontribusi bagi ilmu Administrasi Negara khususnya kebijakan publik.
3. Secara praktis, dapat menjadi salah satu acuan atau dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pemangku kebijakan dalam mengimplementasikan program tersebut.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan peneliti dalam memahami, menggambarkan dan menjawab serta menjelaskan fenomena penelitian. Tinjauan pustaka merupakan bagian penting untuk menganalisa penelitian yang dilakukan dengan melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan utama dalam menjawab fenomena/masalah dengan landasan konseptual yang dibangun melalui literatur-literatur yang bersifat edukatif. (Cooper, 2010; Marshall & Rossman, 2011 dalam Creswell, 2016:36)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tinjauan pustaka merupakan sebuah bahan untuk membantu peneliti dalam menganalisis sebuah penelitian melalui konsep, teori dan penelitian terdahulu terkait topik penelitian yang menjadi dasar membangun kerangka berpikir. Konsep dasar penelitian berperan penting dalam membangun kerangka berfikir peneliti (Silalahi 2010:112). Konsep dasar tersebut dijadikan acuan dalam penulisan penelitian. Dengan adanya konsep dasar ini diharapkan penelitian dapat fokus pada permasalahannya atau fokus penelitiannya. Berikut peneliti cantumkan konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini terkait beberapa teori terkait kinerja implementasi dalam program bank sampah di kota Probolinggo.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bagian dari administrasi negara dan menjadi domain dari sebuah program. Teori kebijakan publik perlu dicantumkan karena peneliti akan melihat dari sisi tujuan direalisasikan sebuah kebijakan yang dapat menjadi langkah konkrit pemerintah sebagai rekayasa sosial. Pada perspektif tujuan kebijakan, kebijakan publik memiliki berbagai sifat, salah satunya regulatif yang merupakan sifat memerintah atau menciptakan kontrol dalam menstabilkan dan mengatasi permasalahan. Dengan demikian kebijakan menjadi kontrol melalui peraturan/regulasi sebagai tujuan mengatasi masalah. Hubungan

dengan penelitian ini adalah diterapkannya kebijakan melalui program bank sampah sebagai wujud keprihatinan terhadap pengelolaan sampah tidak ramah lingkungan sehingga harapannya masyarakat mampu menjalankan program bank sampah sesuai prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan konsep bagian dari kebijakan publik. Implementasi kebijakan turut dinilai krusial dalam menyangkut pengambilan keputusan atau tindakan implementor, secara lanjut melalui program dalam capaian kebijakan. Hasil dari kebijakan yaitu keluaran (*output*) dan harapan (*outcome*) yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan. Namun hasil tersebut tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat yang kerap mempengaruhi hasil. Dengan demikian implementasi memiliki andil dalam mencapai tujuan yang kerap dipengaruhi berbagai faktor tertentu dalam implementasi kebijakan.

Konsep implementasi kebijakan memiliki hubungan melalui program pemerintah dalam menekan angka timbulan sampah dalam upaya melestarikan lingkungan melalui program bank sampah. Program bank sampah sebagai langkah pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam bekerjasama mengelola sampah pada sumbernya dengan teknik 3R, sehingga memiliki tujuan dalam mengurangi sampah. Melalui konsep implementasi kebijakan tersebut diharapkan masyarakat pada program bank sampah turut berperan penting sebagai subjek dan objek dalam gerakan partisipasi pengelolaan sampah 3R.

Pada bahasan diatas, peneliti menggunakan konsep implementasi kebijakan publik untuk menggambarkan program bank sampah saat direalisasikan pada keadaan masyarakat. Hal tersebut karena implementasi kebijakan merupakan cara untuk mencapai tujuan kebijakan melalui program atau kegiatan. Akan tetapi, peneliti tidak menjabarkan proses implementasi secara kompleks sehingga peneliti

tidak lebih dari menggambarkan proses implementasi saat di lapangan yang dinilai sangat penting terkait cara mencapai hasil kebijakan.

3. Kinerja Kebijakan

Konsep kinerja kebijakan merupakan bagian dalam studi implementasi, sebab kinerja akan membuat *judgement* (penilaian) terhadap implementasi dikatakan berhasil atau gagal di dalam mewujudkan tujuan kebijakan melalui hasil. Penilaian kinerja yang dimaksudkan adalah evaluasi *on going* atau yang dikenal sebagai *monitoring*. Dalam hal penilaian sebuah kebijakan bukan persoalan mudah karena banyak implikasi terhadap yang dinilai dan penilai. Bagi pihak yang dinilai, keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan akan menggambarkan akuntabilitas terhadap tugasnya. Sebagai contoh kebijakan program bank sampah dinilai gagal maka akan mendapatkan sanksi atau kerugian, namun sebaliknya kebijakan dinilai berhasil maka akan mendapatkan penghargaan (*reward*) atau keuntungan.

Bagi peneliti yang berperan dalam penilai memiliki beban akademik, profesi, dan moral untuk mempertanggungjawabkan hasil penilaiannya yang turut muncul sebagai kesimpulan. Hal tersebut akan menjadi konsekuensi peneliti berkaitan kinerja implementasi maka ketepatan metode yang digunakan untuk menilai kinerja, seperti pemilihan indikator penilaian; pengumpulan data; dan analisis data menjadi penting dalam menegakkan *judgement* tentang kinerja implementasi suatu kebijakan. Dengan demikian peneliti akan memfokuskan perhatian pada isu-isu utama tentang penilaian kinerja, meliputi pengembangan indikator, metode evaluasi kinerja, teknik pengumpulan dan analisis data.

Konsep kinerja kebijakan melalui program bank sampah dengan menggambarkan dan menilai implementasi terkait hasil program bank sampah. Peneliti turut menilai dari pemerintah, instansi tertentu hingga masyarakat karena program tersebut mampu berperan penting terkait rekayasa sosial. Dengan demikian, peneliti memiliki tujuan untuk

menggambarkan kondisi saat program bank sampah direalisasikan atau diimplementasikan sehingga mampu menilai program tersebut dapat dikatakan berhasil atau gagal.

4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan konsep rekayasa sosial dalam kepentingan publik pada ruang lingkup lingkungan. Administrasi negara sejatinya masuk dalam ranah mekanisme terkait kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan memiliki tujuan dalam menanggulangi dan melestarikan lingkungan, misalnya kebijakan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah diartikan sebagai kegiatan mengelola sampah dalam bentuk penanggulangan sampah yang semakin meningkat melalui 3R. Dengan adanya kebijakan pengelolaan sampah turut berkontribusi dalam *controlling* terhadap perilaku masyarakat sehingga harapannya mampu mengubah perilaku masyarakat yang peduli lingkungan.

Penelitian ini memiliki fokus terhadap pengelolaan sampah melalui program bank sampah sebagai alternatif solusi menangani masalah sampah dengan teknik 3R. Pada program tersebut, partisipasi masyarakat dinilai penting dalam rekayasa sosial sehingga menentukan hasil dalam mencapai tujuan bank sampah.

Berdasarkan uraian-uraian singkat terkait konsep-konsep yang telah peneliti jelaskan sebagai dasar dalam penelitian. Penjelasan secara lebih rinci terkait konsep-konsep tersebut sebagai berikut.

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dan unsur terpenting dalam administrasi negara. Secara sederhana kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu kebijakan dan publik (Nugroho 2011:96). Kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh seseorang yang memiliki kewenangan bersifat otoritatif, baik formal maupun informal (*decision made by the one hold authority, formal or informal*). Kewenangan secara formal seperti presiden, menteri dan lainnya. Kewenangan secara informal seperti kyai, kepala suku dan lainnya.

Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Publik merupakan sebuah tempat seseorang menjadi warga negara; ruang dimana warga negara berinteraksi; serta negara dan masyarakat itu ada (*a sphere where people become citizen, a space where citizens interact, where state and society exist*). Sehingga kebijakan publik dianalogikan sebagai otak manusia, karena seluruh aktifitas bernegara dan bermasyarakat dimulai unsur tersebut.

Kebijakan publik merupakan sebuah program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (Harold Laswell & Abraham Kaplan dalam Nugroho 2011:93). Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada (Carl I. Friedrich dalam Nugroho 2011:93). Kebijakan diusulkan tersebut ditujukan dalam memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks perseorangan; kelompok; komunitas; hingga organisasi, kebijakan publik merupakan instrumen nyata dalam menggambarkan ikatan atau hubungan riil antara pemerintah dan masyarakat kaitannya sebagai proses awal penyelenggaraan negara.

Pada bahasan lain, kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang dibuat oleh negara dalam merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik sebagai alat dan strategi negara dalam rekayasa sosial. Dalam penelitian ini kebijakan publik berkaitan dengan langkah *preventif*, *promotif* dan *koperatif* pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan khususnya sampah. Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* terkait Bank Sampah. Dengan adanya peraturan tersebut, harapannya mampu terciptanya lingkungan yang bersih melalui kepedulian masyarakat dalam mengelola sampah di bank sampah.

Selaras dengan pemerintah pusat, pada tingkat daerah juga terlebih dahulu menetapkan peraturan yang hampir serupa yaitu Peraturan Daerah Kota Probolinggo nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah. Meskipun terkait masalah lingkungan pada berbagai daerah, namun peraturan tersebut ditujukan dalam memberikan edukasi dan kontrol terhadap masyarakat agar mengelola

sampahnya dengan baik. Dengan demikian, masyarakat diberikan keleluasaan oleh pemerintah daerah dalam mengelola sampah melalui bank sampah.

Menanggapi adanya fenomena bank sampah di masyarakat, pemerintah daerah mendukung aksi masyarakat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo nomor 2015 tentang Tim Pelaksana Pelayanan Bank Sampah Kota “Masyarakat Probolinggo menuju Sejahtera atau Maspro Mesra”. Bank sampah Maspro Mesra dibawah naungan UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah (PSL) Dinas Lingkungan Hidup kota Probolinggo sebagai induk dari bank sampah unit-unit yang ada di masyarakat. Dengan demikian, bank sampah induk bertugas dalam melayani bank sampah unit yang memiliki kesulitan dalam mengelola sampahnya. Melalui berbagai regulasi tersebut, maka negara sudah merealisasikan tujuan negara dalam program bank sampah sebagai langkah konkrit melalui rekayasa sosial.

2.1.1 Bentuk Kebijakan Publik

Berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 (1) mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yakni antara lain Undang-Undang Dasar Negara Replublik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kekuatan hukum dari masing-masing peraturan tersebut ditegaskan pada pasal 7 (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Secara sederhana kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga (Nugroho, 2011:104) sebagai berikut.

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum yaitu ketujuh peraturan yang disebut diatas.
2. Kebijakan publik bersifat meso atau menengah atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota dan lainnya.

3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati dan walikota.

Pada bahasan lain terkait berbagai kebijakan dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah dari pemerintahan pusat hingga daerah, terdapat 4 (empat) dasar hukum yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk kebijakan yaitu:

- a. Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (bab IX pasal 28) termasuk dalam bentuk kebijakan publik pada tingkat pusat dan bersifat makro merupakan kebijakan kebijakan publik yang berkenaan dengan usaha-usaha pembangunan nasional meliputi negara serta rakyat;
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah termasuk dalam bentuk kebijakan publik yang bersifat Messo atau menengah, atau menengah atau penjas pelaksana yang dalam hal ini dikeluarkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah;
- c. Peraturan Daerah kota Probolinggo nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah termasuk kebijakan publik pada tingkat lokal/daerah yang bersifat makro merupakan kebijakan kebijakan publik terkait usaha-usaha kontribusi daerah terhadap pembangunan nasional;
- d. Surat Keputusan Walikota Probolinggo nomor 39 tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Pelayanan bank sampah kota “Masyarakat Probolinggo menuju Sejahtera atau MasPro Mesra” termasuk kebijakan yang bersifat messo karena ditetapkan walikota terkait dalam penjelasan dalam pelaksanaan bank sampah induk MasPro Mesra kota Probolinggo.

Pada kebijakan lainnya yang mengatur implementasi terkait bank sampah, masyarakat secara mandiri mengelola mekanisme kerja bank sampah sebagai unit. Dengan adanya kemandirian masyarakat, kebijakan tersebut turut digolongkan pada kebijakan yang bersifat mikro yang mencakup tata cara pelaksanaan bank

sampah dibawah pengelolaan masyarakat. Hal tersebut menekankan tujuan program bank sampah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di lingkungannya sebagai rekayasa sosial.

2.1.2 Mekanisme Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2014) berbagai siklus kebijakan publik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

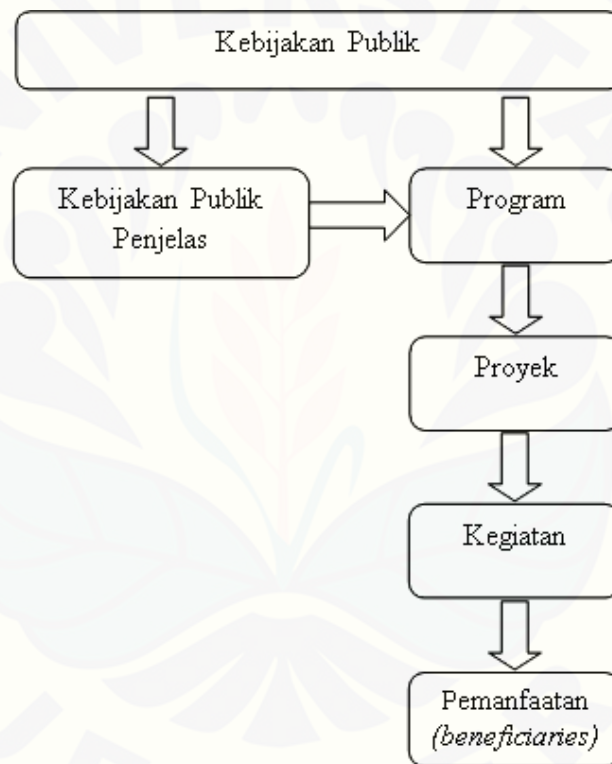
1. Isu Kebijakan disebut isu strategis, yaitu bersifat mendasar menyangkut banyak orang atau implementasi kebijakan dalam menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik. Rumusan kebijakan ini akan menjadi bagian hukum seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negaranya.
2. Pasca dirumuskan kebijakan public maka dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah dan masyarakat bersama-sama.
3. Pada proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi serta *controlling*.
4. Implementasi kebijakan bermuara pada *output* yang terdiri atas kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan.
5. Dampak jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dan *impact*. *Impact* atau dampak dapat berupa dampak yang diharapkan (*intended impact*) dan dampak yang tidak diduga (*unintended impact*).

Peneliti berfokus pada sebuah pendekatan implementasi program yaitu sebuah kegiatan distribusi *deliver* terkait program bank sampah. Kemudian implementasi tersebut menghasilkan *output*/keluaran secara langsung menimbulkan konsekuensi atas kelompok sasaran. *Output* tersebut berimplikasi pada menghasilkan sebuah dampak lanjutan (*outcome*) dari implementasi. Dengan demikian, pendekatan implementasi menjadi dasar terciptanya *output* dan *outcome* sebagai bentuk kinerja dari sebuah kebijakan atau program.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan melalui penetapan undang-undang,

pelaksanaan undang-undang dengan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk turut serta dalam menjalankan kebijakan sebagai upaya meraih tujuan kebijakan atau program-program (Donald van Meter, and Carl E van Horn (1975), dalam Budi Winarno; 2007:144). Prinsip implementasi kebijakan adalah cara sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya melalui proses implementasi dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik (Riant Nugroho, 2008:432-433). Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Sekuensi Implementasi Kebijakan (Sumber: Riant Nugroho, 2017:729)

Implementasi program merupakan satu tahapan dari sebuah proses kebijakan tertentu. Tahap implementasi termasuk dalam tahap krusial karena bersinggungan langsung dengan masyarakat sebagai target kebijakan. Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) menegaskan bahwa pada implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan

akan tercapai manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan, inilah yang disebut implementasi sebagai sebuah “*delivery mechanism policy output*”, seperti gambar berikut.



Gambar 2.2 Implementasi sebagai *Delivery Mechanism Policy Output* (Sumber: Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 21)

Pada proses implementasi kebijakan, secara tidak langsung kelompok sasaran turut mendapatkan berbagai konsekuensi terkait program pada kebijakan, sehingga studi implementasi tidak hanya berhenti dalam mengukur hasil implementasi, seperti *policy output* (keluaran kebijakan) berlanjut kepada harapan (*outcome*) sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2.1. Harapan yang dihasilkan dari program tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat diukur melalui hasil berupa *output* dan *outcome* terkandung dalam kelompok sasaran terkait konsekuensi implementasi.

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan operasional dalam memahami apa yang terjadi, baik *policy output* hingga *outcome*. Dengan kata lain, implementasi program kebijakan dilakukan oleh implementor terkait *policy output* (keluaran kebijakan) yang dihasilkan dan didapatkan oleh sasaran kebijakan sebagai penerima manfaat program kebijakan yang dapat dilihat dari dampak dari program kebijakan (*policy outcome*).

1. Model Merilee S. Grindle. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya (Mulyadi, 2016:66). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Model implementasi kebijakan Grindle, memiliki keunikan yang terletak pada pemahaman komprehensifnya akan konteks kebijakan,

khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang memungkinkan terjadi diantara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

2. Model *Mazmanian dan Zabatier*. Mazmanian dan Zabatier dalam Mulyadi (2016:70) menjelaskan bahwa terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
 1. Karakteristik dari masalah, indikatornya:
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
 2. Karakteristik kebijakan/Undang-undang, indikatornya:
 - a. Kejelasan isi kebijakan;
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
 - c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut;
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana;
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
 3. Variable lingkungan
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
 - b. Dukungan politik terhadap sebuah kebijakan;
 - c. Sikap dari kelompok pemilih;
 - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

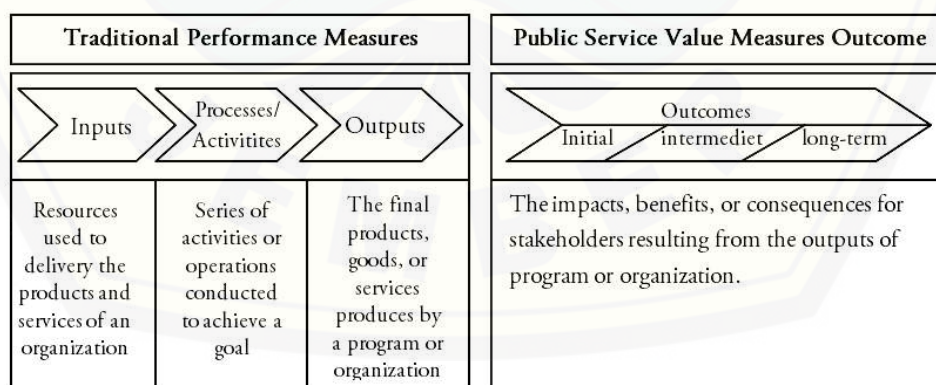
3. Model *Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn*. Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016:72) menjelaskan bahwa ada enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi.
 1. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.
 2. Sumber daya, yaitu kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
 3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
 4. Karakteristik agen pelaksana yaitu sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberitakan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
 5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yaitu mencakup sumber daya, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
 6. Disposisi implementor, yaitu:
 - a. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
 - b. Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan;
 - c. Intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2.3 Kinerja Implementasi Kebijakan

Dalam studi implementasi kebijakan hakikatnya memiliki tujuan pokok dalam menjelaskan berbagai fenomena implementasi kebijakan. Fenomena implementasi kebijakan mampu menghasilkan capaian implementasi yang

berbeda, bisa dikatakan kegagalan atau keberhasilan dari suatu kebijakan. Hal tersebut dapat dikonseptualisasi sebagai kinerja kebijakan. Konsep kinerja kebijakan juga erat kaitannya dengan evaluasi kebijakan, yang bermakna sebagai evaluasi implementasi kebijakan dan/atau evaluasi hasil kebijakan (Riant Nugroho, 2017:793). Pada intinya, kinerja kebijakan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program maupun kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan. Sehingga kinerja kebijakan dinilai sangat krusial karena mampu menggambarkan tingkat pencapaian implementasi sehingga muncul penilaian (*judgement*) terhadap hasil kebijakan dapat dikatakan berhasil atau gagal.

Secara metodologis, kinerja kebijakan akan menghasilkan suatu hubungan sebab-akibat terkait hasil dengan berbagai faktor pada proses implementasi sehingga menyebabkan tinggi atau rendah kinerja. Penilaian terhadap kinerja dipakai peneliti untuk menjawab pertanyaan pokok dalam studi implementasi, yaitu: (i) apa isi dan tujuan dari suatu kebijakan; (ii) apa tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut; dan (iii) apakah setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan akan mampu mewujudkan tujuan kebijakan atau tidak. Kerangka pikir yang dapat digunakan untuk menilai kinerja implementasi suatu kebijakan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



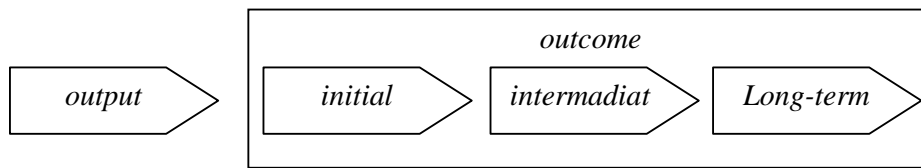
Gambar 2.3 Kerangka Logis Pengukuran Kinerja Implementasi (Sumber: Cole and Parston (2006) dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:100)

Dari gambar diatas, terlihat bahwa tercapainya tujuan suatu kebijakan akan melalui beberapa tahapan yang cukup panjang. Tahapan tersebut dimulai dari adanya: (i) input kebijakan (sumber daya) yang dipakai untuk menghasilkan

produk dan layanan dari suatu program; (ii) proses atau kegiatan (kegiatan untuk menghasilkan produk dan layanan publik), dan keluaran (*output*) kebijakan berupa produk dan layanan publik yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran; (iii) dampak langsung; (iv) dampak jangka menengah; dan (v) dampak jangka panjang yang dirasakan oleh kelompok sasaran program kebijakan. Pada tahapan implementasi dapat diketahui melalui terdapat proses dalam bentuk kegiatan untuk menghasilkan produk dan layanan publik yang mampu dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan adalah proses mendistribusikan keluaran kebijakan (*output*) kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Dengan demikian, kelompok sasaran mampu memanfaatkan *output* dalam tujuan hakiki dari implementasi kebijakan.

Pada keseluruhan implementasi kebijakan dapat dinilai dengan mengukur capaian *outcome* kebijakan yang dibandingkan dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu *policy outcomes impact on society, individuals, and group in form of expected change* (Grindle, 1980:7).. Hal tersebut dimaksudkan adalah hasil kebijakan dapat dibuktikan terkait adanya perubahan yang diharapkan terhadap sasaran kebijakan mencakup individu; kelompok; organisasi dan publik. Pada beberapa bahasan tertentu, jika hasil kebijakan mampu memberikan perubahan sesuai dengan harapan maka dapat dikatakan kebijakan berhasil. Namun jika hasil kebijakan tidak atau belum mampu memberikan dampak perubahan, maka dapat dikatakan kebijakan gagal. Dengan demikian, hasil dari suatu kebijakan yang sesuai harapan (*outcome*) menjadi tolok ukur terhadap proses implementasi untuk mencapai tujuan kebijakan.

Uraian diatas merupakan penjabaran dari kerangka logis apabila diterapkan pada sebuah kebijakan/program. Kerangka tersebut tercipta dalam bentuk rangkaian kejadian pada gambar 2.4 menunjukkan bagaimana kerangka logis diwujudkan suatu kinerja implementasi dapat dicapai. Gambar 2.4 memfokuskan pada tahapan *output* (keluaran) yang kemudian menghasilkan *outcome* (manfaat), kerangka tersebut sebagai berikut.



Gambar 2.4 Pengukuran Kinerja Program (Sumber: Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:101)

Ketika *policy output* telah sampai kepada kelompok sasaran maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan *policy effect* (efek suatu kebijakan) atau sering disebut *initial outcome* yaitu dampak langsung terhadap kelompok sasaran. *Policy effect* dapat dirasakan apabila kelompok sasaran secara keseluruhan mampu memanfaatkan *policy output* kearah positif, maka dapat dikatakan *policy outcome* telah masuk pada tujuan kebijakan dan kinerja kebijakan tergolong baik. Dengan adanya *policy output* dan *policy outcome* sebagai indikator, maka dalam menilai kinerja implementasi kebijakan patut menggunakan indikator tersebut karena menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2.3.1 Indikator Pengukuran Kinerja

Dalam bahasan kinerja merupakan penilaian terhadap sesuatu sehingga sebuah *justifikasi* memerlukan alat bantu dalam mengukur. Penilaian terkait implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil atau gagal, maka peneliti perlu melakukan penilaian terhadap kinerja. Alat bantu yang dipakai untuk dapat menilai baik atau buruknya kinerja implementasi kebijakan disebut indikator. Indikator pada kebijakan publik merupakan instrument penting untuk mengevaluasi terkait keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, program atau proyek.

Indikator memiliki fungsi untuk mengetahui ukuran kinerja berdasarkan *input*, *output*, *outcome* dan dampak yang dipantau selama proses implementasi guna mencapai tujuan kebijakan (World Bank, 1996 dalam Purwanto dan Sulistyastuti 2015:102). Sebagai alat ukur, indikator dapat bersifat kualitatif (naratif) dan kuantitatif (angka-angka) yang berguna menggambarkan tingkatan capaian kebijakan terhadap sasaran dan tujuan kebijakan, maka indikator sebagai penanda terkait hasil kebijakan mampu mencapai kearah yang diharapkan atau

tidak. Apabila terjadi masalah dalam proses atau hasil implementasi, maka implementor memiliki waktu dalam mengambil keputusan guna menentukan langkah *solutif*. Dengan demikian hasil pencapaian menjadi tolok ukur sebagaimana kinerja dapat ditentukan melalui implementasi kebijakan yang dipengaruhi berbagai faktor di lapangan.

a. Indikator *Output*

Dimensi utama untuk mengukur kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu: dimensi *policy output* dan dimensi *policy outcome*. Dimensi *output* digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi meliputi *output*; kelompok sasaran (individu, kelompok, organisasi atau public); frekuensi kegiatan; dan kualitas produk/pelayanan. Hal tersebut digunakan pada kebijakan yang bersifat distributif, dimaksudkan kebijakan yang membantu anggota masyarakat yang memiliki kekurangan atau masalah material (Ripley, 1986 dalam Purwanto dan Sulistyani 2015:106)

Berpedoman pada Ripley, Purwanto dan Sulistyani (2015: 106) menjelaskan bahwa berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas hasil kebijakan adalah sebagai berikut:

1) Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses memiliki pengertian bahwa orang-orang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual atau kelompok yang melekat pada dirinya, seperti: gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian, akses

juga dapat berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.

2) Cakupan (*coverage*)

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan.

3) Frekuensi

Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Tingkat frekuensi layanan turut memberikan konsekuensi terkait hasil kebijakan, sehingga mampu menggambarkan keberhasilan implementasi atau program. Apabila tingkat frekuensi layanan tergolong sering dan tinggi maka semakin baik implementasi atau program, dan sebaliknya.

4) Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak eligible untuk menikmati bantuan, hibah, atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

5) *Service delivery* (ketepatan layanan)

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. Indikator sangat penting untuk menilai *output* suatu program yang memiliki sensitivitas terhadap waktu. Apabila terjadi keterlambatan implementasi program maka akan membawa implikasi kegagalan mencapai program tersebut. Maka melalui indikator ini kerap digunakan dalam kebijakan atau program yang bersifat pencegahan atau bisa disebut preventif, yang tujuannya mengkaji waktu maupun kondisi terhadap program yang diimplementasi dalam rangka mencegah atau mengatasi masalah.

6) Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau merupakan bentuk penyimpangan.

7) Kesesuaian program dengan kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Sehingga dibutuhkan analisis data kelompok sasaran beserta keluhan/masalah dalam mengukur kesesuaian dan ketepatan terkait keluaran dari kebijakan. Dengan melalui kebijakan, merupakan langkah memenuhi kebutuhan dalam mengatasi masalah dari kelompok sasaran.

Tabel 2.1 Indikator Keluaran Kebijakan (Policy Output)

No	Indikator	Penjelasan	Pertanyaan Relevan
1	Akses	Indikator akses digunakan untuk mengetahui seberapa mudah program dijangkau atau diterima oleh kelompok sasaran. Selain itu juga akses mengandung pengertian bahwa seberapa mudah kelompok sasaran menjangkau para pelaksana mengenai informasi program serta pengaduan selama proses implementasi program. Selain itu juga, indikator akses digunakan untuk menilai apakah ada diskriminasi terhadap kelompok sasaran terkait program yang diterima.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa mudah kelompok sasaran untuk berkomunikasi (keluhan) dengan pelaksana jika mendapatkan masalah? 2. Seberapa mudah bagi kelompok sasaran menggunakan media komunikasi misalnya <i>SMS service</i> atau <i>call center</i>? 3. Apakah lokasi lembaga tersebut mudah dijangkau? 4. Apakah kelompok sasaran yang terdiri dari latar belakang yang berbeda mempunyai akses yang sama terhadap program atau tidak?
2	Cakupan	Indikator ini digunakan untuk menilai berapa besar kelompok sasaran yang dapat dijangkau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa yang menjadi kelompok sasaran dan seberapa banyak masyarakat yang menjadi

		oleh kebijakan yang diimplementasikan.	kelompok sasaran?
3	Frekuensi	Indikator ini mengukur seberapa sering kelompok sasaran mendapatkan layanan program. Semakin sering (tinggi) tingkat frekuensi layanan maka semakin baik implementasi program, dan sebaliknya.	1. Berapa sering layanan program diberikan kepada kelompok sasaran?
4	Bias	Indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh para implementor menyimpang dari kelompok sasaran yang sudah ditentukan.	1. Apakah terdapat penerima layanan program diluar dari sasaran program yang sudah ditentukan?
5	<i>Service Delivery</i> (Ketepatan Layanan)	Digunakan untuk menilai apakah layanan yang diberikan dalam implementasi program dilakukan tepat waktu atau tidak. Sudah jelas bahwa penggunaan indikator ini mengacu kepada program yang memiliki waktu atau <i>timing</i> yang tepat saat dilakukan	1. Apakah program mampu menghindari kelompok sasaran dari hal-hal yang tidak diinginkan? 2. Apakah program dijalankan ketika terdapat keluhan atau permintaan masyarakat?
6	Akuntabilitas	Indikator ini digunakan untuk menilai tindakan para implementor dalam menjalankan program terkait menyampaikan keluaran (<i>output</i>) kepada kelompok sasaran.	1. Apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak?
7	Kesesuaian program dengan kebutuhan	Indikator yang digunakan untuk menentukan keluaran kebijakan yang diterima <i>target group</i> sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak	1. Apakah program kebijakan sesuai dengan kebutuhan atau tidak?

Sumber: Ripley, Randall B (1985)

b. Indikator *Outcome*

Dimensi kedua adalah *policy outcome*, yaitu untuk menilai hasil implementasi suatu kebijakan. Berbagai perubahan yang muncul sebagai konsekuensi implementasi suatu kebijakan atau program tersebut perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana kinerja implementasi kebijakan atau program. Hubungan kausalitas antara hasil kebijakan dengan perubahan kondisi

masayarakat, merupakan hal yang dikehendaki pada implementasi kebijakan sebagai langkah mengatasi masalah. Menurut Purwanto dan Sulistyani (2015:107), penilaian pada hasil (*outcome*) program meliputi tahap *initial outcome* (hasil langsung dari kebijakan), tahap *intermediate outcome* (hasil jangka menengah dari kebijakan), dan tahap *long-term outcome* (hasil jangka panjang dari kebijakan/ dampak).

Outcomes jangka pendek adalah pembelajaran (*learning*) meliputi *awareness* (kesadaran), *knowledge* (pengetahuan), *attitudes* (sikap), *skill* (keterampilan), dan seterusnya. *Outcomes* jangka menengah adalah aksi (*action*) meliputi *behaviour* (perilaku), *practice* (profesi/ praktek), *decision making* (pengambilan kebijakan), dan lain sebagainya. *Outcomes* jangka panjang adalah kondisi yang diharapkan (*conditions*) meliputi kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi sipil, kondisi kesehatan, dan lain sebagainya (University of Wisconsin, 2015). Dengan demikian, konsekuensi implementasi kebijakan terhadap *outcome* terkait tingkat kompleksitasnya sangat dipertimbangkan sehingga tujuan kebijakan pada hakikatnya merubah kondisi kelompok masyarakat kearah yang positif.

2.4 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan dalam bahasa inggris dari kata *management*, sehingga dalam bahasa Indonesia disamakan dengan manajemen yang berarti pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 1993:31). Kata pengelolaan memiliki arti yaitu aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang keseluruhannya dilakukan oleh berbagai organisasi dalam rangka mengkoordinasikan berbagai sumber daya guna menghasilkan suatu produk dan jasa secara efisien (Adrew F. Sikul dalam Saifuddin, 2014:53). Dengan demikian, pengelolaan merupakan langkah mengelola berupa aktivitas manajerial yang memiliki tujuan menghasilkan produk atau pelayanan.

Sampah pada dasarnya merupakan konsep buatan manusia, dimaksudkan sebuah material sisa hasil kegiatan sehari-hari yang berasal dari rumah tangga,

pertanian, industri, bongkaran bangunan, perdagangan, dan perkantoran (Suwerda, 2012). Sampah merupakan salah satu masalah yang dihadapi hampir diseluruh negara di dunia, salah satunya Indonesia. Sampah menjadi fenomena permasalahan publik yang sering dibahas karena volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam dengan pengelolaannya yang belum berwawasan lingkungan. Hal tersebut disebabkan kurangnya edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah sehingga kecenderungan masyarakat hanya menghasilkan dan membuang sampah tanpa adanya proses pengelolaan lebih lanjut. Sampah yang menumpuk tentu berdampak pada lingkungan misalnya terjadi pencemaran; menimbulkan penyakit dan bau yang tidak sedap. Dengan demikian, sampah perlu dikelola dengan metode dan teknik yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pengelolaan sampah terutama rumah tangga di berbagai daerah menjadi masalah bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Atas dasar tersebut, maka pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Melalui regulasi tersebut, bertujuan menjamin pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai suatu disiplin yang berkaitan dengan pengendalian atas timbulan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat, ekonomi, keteknikan, konservasi, estetika, dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya (Tchobanoglous et al. 1993). Ruang lingkup pengelolaan sampah mencakup semua aspek yang terlibat dalam keseluruhan spektrum kehidupan masyarakat meliputi fungsi administratif, keuangan, hukum, perencanaan, dan fungsi-fungsi keteknikan dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan oleh setiap orang dalam mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, salah satu

alternatif solusi yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat yaitu melalui bank sampah.

Bank sampah ini telah diterapkan diberbagai daerah secara tidak langsung menjadi program pemerintah daerah untuk memperhatikan kebersihan dan kesehatan warganya. Hal ini menjadi wadah kolaborasi bagi pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk menjaga lingkungannya. Dengan demikian, melalui bank sampah sebagai alternatif solusi dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi aksi nyata pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah langsung dari sumbernya.

2.4.1 Program Bank Sampah

Program bank sampah merupakan salah satu program pemerintah yang bergerak pada pengelolaan sampah dalam mengurangi timbulan sampah rumah tangga. Bank sampah dilatarbelakangi oleh kebiasaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan terutama mengelola sampah. Melalui bank sampah, kementerian lingkungan hidup sebagai langkah nyata mengajak masyarakat dalam mengelola sampahnya dengan metode 3R (*reduce, reuse, recycle*). Pada dasarnya bank sampah merupakan konsep mengumpulkan dan memilah sampah dengan manajemen layaknya perbankan, menabung sampah. Konsep tersebut hakikatnya memudahkan masyarakat dalam mengelola sampah pada sumbernya secara langsung.

Bank sampah pada prinsipnya menggunakan rekayasa sosial (*social engineering*) yaitu mengajak dan mengajarkan masyarakat memilah sampahnya secara mandiri dengan maksud merubah kebiasaan atau perilaku masyarakat terhadap sampah (Ridley-Duff dan Bull, 2011). Pelaksanaan bank sampah menggunakan pendekatan yang sesuai dengan konteks masyarakat dan kesesuaian kebutuhan masyarakat, maka dengan mengajak masyarakat turut serta dalam mengumpulkan sampah dan memberikan imbalan/*reward* berupa barang kebutuhan atau uang. Sehingga bank sampah secara mandiri memberdayakan masyarakat sekitar untuk turut serta mengelola sampah di bank sampah. Dengan demikian, bank sampah merupakan sebuah rekayasa sosial dalam pengelolaan

sampah yang secara mandiri menggunakan metode 3R dan memberikan *reward* kepada masyarakat yang mengumpulkan sampahnya di bank sampah.

Pengembangan bank sampah dianggap meringankan tugas pemerintah dan pemerintahan daerah yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengelola sampah guna mengurangi sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir atau TPA. Bank sampah juga dinilai inovasi dan solutif yang mampu menciptakan komunikasi-komunikasi antarmasyarakat melalui kegiatan mengolah sampah yang memberikan manfaat secara sosial dengan memperkuat kohesi sosial bagi keberadaan komunitas bank sampah yang didalamnya termarginalisasi dalam konstruksi sosial budaya. Dengan demikian, program bank sampah merupakan pengelolaan sampah yang diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi sehingga mampu menghasilkan manfaat yang kompleks.

Program bank sampah ini salah satu program dalam pengelolaan sampah. Adanya program bank sampah, diharapkan mampu membiasakan pola hidup masyarakat peduli lingkungan, lingkungan menjadi bersih bahkan mampu menciptakan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses implementasi dari program bank sampah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah kota Probolinggo Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah menjadi dasar hukum dalam program bank sampah. Didukung juga dengan dikeluarkannya surat keputusan walikota Probolinggo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Pelayanan Bank Sampah Kota “Masyarakat Probolinggo menuju Sejahtera atau Maspro Mesra”. Sehingga dalam pelaksanaannya ini berpedoman pada tujuan yaitu membangun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

2.4.2 Partisipasi Aktif

Sondang P. Siagian (Khaeruddin, 1992:125) menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat memiliki makna yang luas dan mutlak diperlukan, oleh karena itu pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan.

Menurut Winardi (1990:202), partisipasi secara formal dapat didefinisikan sebagai keikutsertaannya seseorang, baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan berada dan orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan hal tersebut. Keterlibatan masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosional, lebih dari keterlibatan fisik. Keterlibatan secara mental berarti keterlibatan sebagai suatu kebiasaan hidup di suatu lingkungan tertentu. Sedangkan keterlibatan secara emosional berarti keterlibatan yang benar-benar dirasakan, yang timbul dari hati atau perasaan seseorang sebagai kepentingan bersama.

Pandangan lainnya, sebagaimana dinyatakan Keith Davis (dalam Sastropetro, 1988:13), partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha mencapai tujuan. Dalam memutuskan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam berpartisipasi dibutuhkan adanya perilaku dari masyarakat secara mandiri. Setiap individu dalam berperilaku sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks diantaranya faktor fisiologis seperti keadaan dan kemampuan fisik serta mental seseorang; faktor psikologis seperti persepsi, sikap, kepribadian, intelegensi, motivasi; faktor lingkungan seperti keluarga, kebudayaan, label yang melekat pada diri seseorang seperti status sosial, harga diri, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya.

Umumnya program bank sampah merupakan bentuk pemberdayaan lapisan masyarakat dalam bidang pelestarian lingkungan khususnya pada pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat sangatlah penting karena tujuan program tersebut adalah membangun partisipasi masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah sekaligus membantu pemerintah dalam mencapai tujuan melestarikan lingkungan. Masyarakat yang ikutserta dalam program bank sampah, akan mendapatkan hasil dari keikutsertaannya yaitu edukasi dalam mengelola

sampah; lingkungan menjadi bersih; mampu menciptakan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal tersebut merupakan dilakukan dalam rangka melestarikan lingkungan dengan cara memberdayakan masyarakat yang kemudian menciptakan berbagai manfaat bagi kehidupan masyarakat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu acuan kerangka berfikir yang digunakan peneliti untuk mengkaji atau telaah pustaka terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai alat perbandingan terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan atau perbandingan dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
1.	Muhammad Fariqi	2016	Partisipasi Anggota Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah RW 03 Kelurahan Badean Kabupaten Bondowoso	Partisipasi anggota dalam berjalan dengan baik dari proses pengumpulan sampah, pemilahan, dan penjualan hingga hasilnya dimasukkan menjadi tabungan
2.	Siti Jahro	2018	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Jogosari dan Desa Pleret Kabupaten Pasuruan	Kolaborasi dalam pengelolaan bank sampah di Kabupaten Pasuruan masih bersifat semiformal dan berjalan dengan baik. Setelah adanya bank sampah yakni lingkungan menjadi bersih, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan semakin meningkat, serta mampu memanfaatkan sampah menjadi barang bernilai

				ekonomi
3.	Erlina Muhfida	2018	Pengembangan Masyarakat melalui Paguyuban Peduli Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo	Pemberdayaan masyarakat lokal terkait pengelolaan sampah berbasis <i>bottom up</i> melalui Paguyuban Peduli Sampah (PAPESA) di kota Probolinggo.

Berdasarkan dua penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam pembuatan proposal penelitian ini dapat diketahui persamaan dan perbedaan yaitu.

a. Persamaan Penelitian.

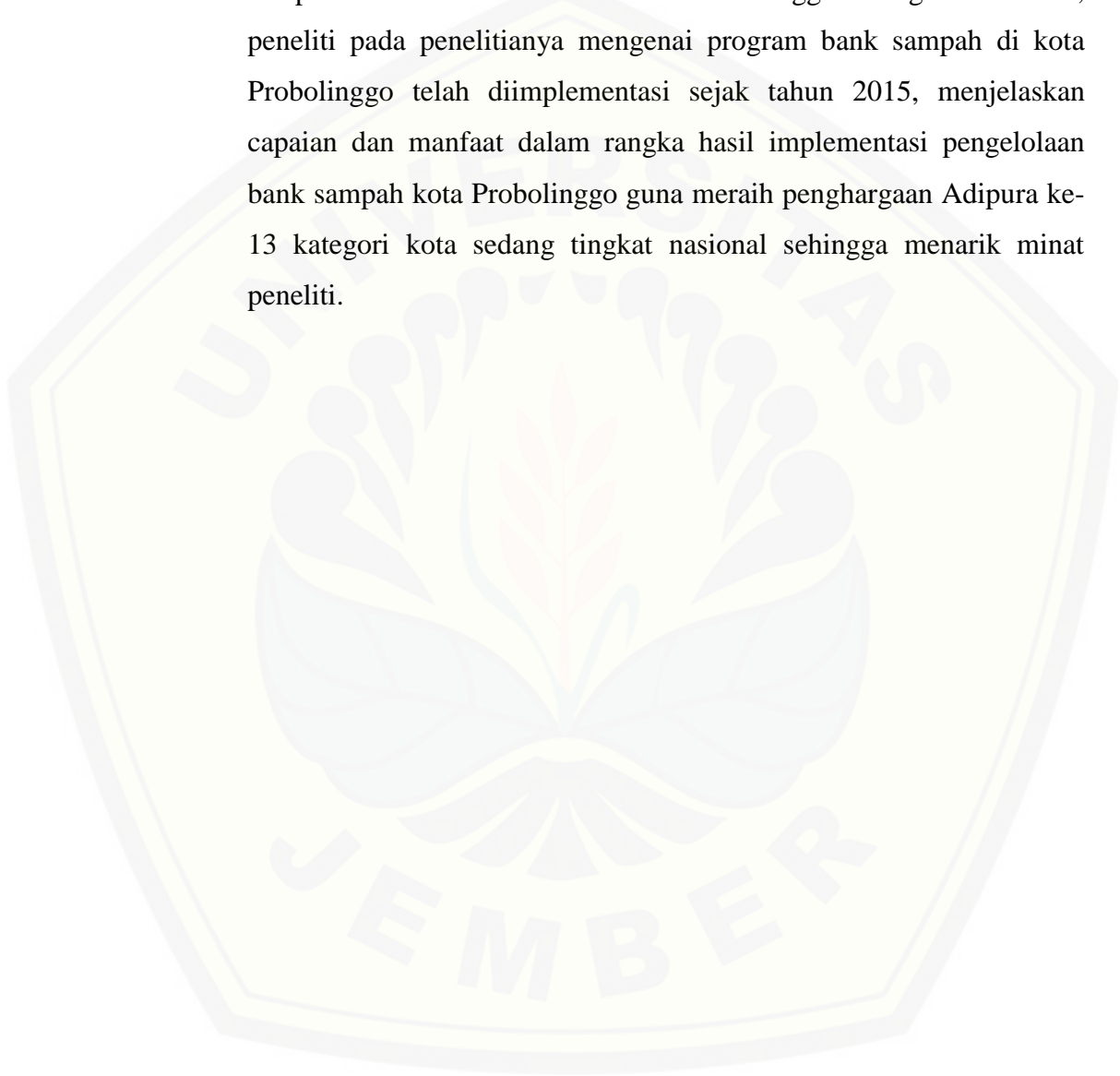
1. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fariqi dengan judul Partisipasi Anggota Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah RW 03 Kelurahan Badean Kabupaten Bondowoso persamaannya yaitu membahas mengenai partisipasi masyarakat terhadap program bank sampah yakni pengelolaan sampah melalui partisipasi masyarakat dengan sarana bank sampah;
2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Jahro dengan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Jogosari dan Desa Pleret Kabupaten Pasuruan persamaannya yaitu hasil dari kolaborasi antara Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup, perusahaan swasta, pengepul dan masyarakat dalam mengimplementasi program bank sampah;
3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Erlina Muhfida dengan Pengembangan Masyarakat melalui Paguyuban Peduli Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo memiliki persamaan yaitu peran pemberdayaan masyarakat sebagai mitra UPT PSL melalui implementasi program bank sampah di kota Probolinggo;
4. Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut pembahasan yang sama yaitu membahas mengenai pengelolaan sampah dan partisipasi

masyarakat pada bank sampah meskipun dengan objek penelitian serta lokasi yang berbeda, kecuali Erlina Muhfida memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu lokasi penelitiannya di kota Probolinggo.

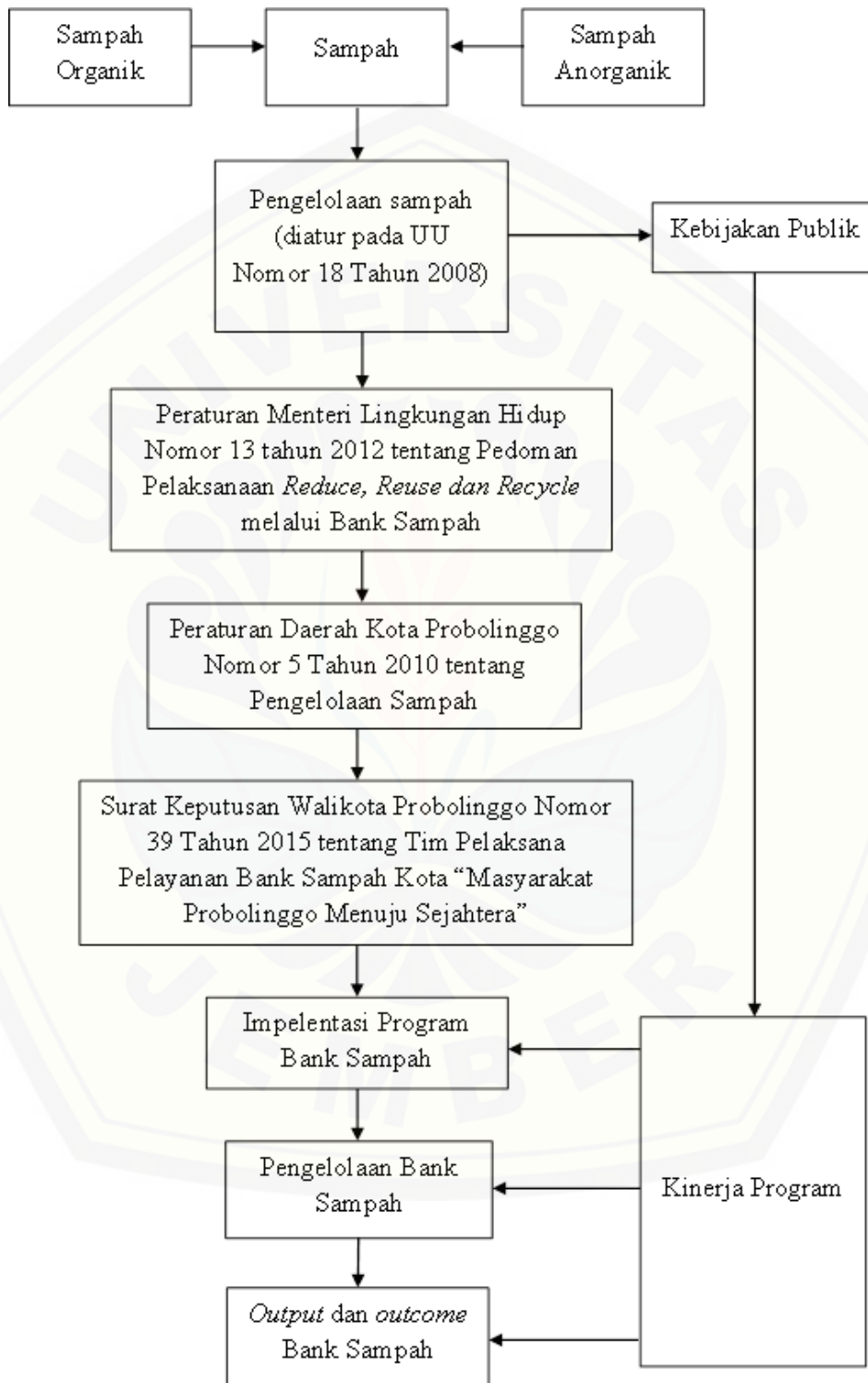
b. Perbedaan Penelitian.

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fariqi dengan judul Partisipasi Anggota Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah RW 03 Kelurahan Badean Kabupaten Bondowoso memiliki perbedaan yaitu menggambarkan proses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Badean Kabupaten Bondowoso, sedangkan peneliti yaitu pada kinerja program bank sampah di Kota Probolinggo meliputi implementasi, hasil (*output*), harapan (*outcome*) dan dampak (*impact*);
2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Jahro *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Jogosari dan Desa Pleret Kabupaten Pasuruan memiliki perbedaan yaitu objek penelitian. Siti Jahro menggunakan kelembagaan pada penelitiannya, sedangkan peneliti menggunakan objek hasil capaian program pada penelitiannya;
3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Erlina Muhfida Pengembangan Masyarakat melalui Paguyuban Peduli Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo memiliki perbedaan yaitu fokus menggambarkan pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan sampah melalui Paguyuban Peduli Sampah. Erlina tidak menekankan segi implementasi pada program bank sampah kota Probolinggo, hanya sebatas menjelaskan bahwasanya PAPESA sebagai bentuk pengembangan dari partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah yang kemudian menjadi mitra Dinas Lingkungan Hidup untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat kota Probolinggo;
4. Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut pembahasan yang berbeda yaitu fokus serta lokasi. Kedua peneliti pada penelitian

terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti, yaitu Ahmad Fariqi meneliti di kabupaten Bondowoso, Siti Jahro meneliti di kabupaten Pasuruan, terkecuali Erlina meneliti di kota Probolinggo. Erlina fokus terdapat pada pengembangan mitra partisipasi masyarakat pengelola sampah melalui PAPESA di kota Probolinggo. Dengan demikian, peneliti pada penelitiannya mengenai program bank sampah di kota Probolinggo telah diimplementasi sejak tahun 2015, menjelaskan capaian dan manfaat dalam rangka hasil implementasi pengelolaan bank sampah kota Probolinggo guna meraih penghargaan Adipura ke-13 kategori kota sedang tingkat nasional sehingga menarik minat peneliti.



2.6 Kerangka Berfikir



Gambar 2.5 Kerangka Berpikir (Sumber: diolah peneliti, 2019)

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:2). Metode penelitian merupakan suatu cara dalam memecahkan masalah yang harusnya dilakukan dengan langkah benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Definisi metode menurut Usman dan Akbar (2009:41) merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Dalam suatu penelitian diperlukan metode yang dijadikan landasan untuk memperoleh data yang objektif, valid dan reliabel. Hasil dari sebuah penelitian akan sangat tergantung terhadap metode apa yang akan digunakan. Dalam menggunakan metode penelitian, peneliti diharapkan dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian
2. Tempat dan Waktu Penelitian
3. Situasi Sosial
4. Desain Penelitian
5. Teknik dan Alat Perolehan Data
6. Keabsahan Data.
7. Teknik Penyajian Data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan dan uraian pada latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2004:6). Pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif diarahkan pada proses penggambaran yang dilakukan secara mendalam tentang situasi atau proses yang akan diteliti (Idrus,

2009:24). Pejelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggambarkan tentang kinerja implementasi dan capaian dalam mengelola sampah melalui program bank sampah di kota Probolinggo.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Menurut Afrizal (2014:128) lokasi atau tempat penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian juga dapat diartikan *setting*/konteks sebuah penelitian. Penelitian yang dipengaruhi oleh tempat dan waktu, perlu deskripsi lengkap tentang tempat dan waktu yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian.

Kota Probolinggo dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan belum ada penelitian yang mengkaji secara mendalam terkait kinerja program bank sampah di Kota Probolinggo. Penelitian akan di fokuskan pada pihak-pihak yang terkait program bank sampah meliputi pengelola program bank sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup secara teknis UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah (UPT PSL); serta kelurahan padat penduduk dan lokasi sebagian bank sampah unit kota Probolinggo yaitu bank sampah Srikandi yang dinilai cocok dan optimal dalam pengelolaan sampah lebih lanjut.

Alasan peneliti bank sampah Srikandi karena bank sampah tersebut berkembang menjadi unit usaha dagang yang memfokuskan pada pemberdayaan perempuan (ibu rumah tangga dan janda) dan pemulung yang menjadi mitra kerja. Selain itu juga, bank sampah Srikandi mampu menggerakkan warga dalam mengelola sampah khususnya sampah anorganik untuk menjadi hiasan/dekorasi tempat tinggalnya sehingga warga bergotong royong mendekorasi kompleks perum Kopian Barat sedemikian rupa, julukannya adalah kampung ReReRe. Hal tersebut

dinilai sukses dalam menggerakkan masyarakat secara luas sehingga memunculkan potensi dari adanya bank sampah yaitu menciptakan ekonomi masyarakat dan lingkungan yang bersih disamping itu mengelola sampah dari sumbernya.

Waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Juli-September 2019. Rentang waktu yang diteliti adalah keadaan masyarakat sebelum dan sesudah didirikannya bank sampah.

3.3 Situasi Sosial

Penelitian dengan metode kualitatif menggunakan istilah situasi sosial. JP Spradley (1980) dalam Satori dan Komariah (2014:111) menyatakan bahwa dalam tiap situasi sosial terdapat tiga komponen yang dapat diamati yaitu ruang (tempat), pelaku (aktor), dan kegiatan (aktivitas). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa elemen situasi sosial yang berinteraksi secara sinergis dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Tempat

Penelitian ini dilakukan di kota Probolinggo mencakup Dinas Lingkungan Hidup kota Probolinggo, UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah (PSL) serta bank sampah unit di kota Probolinggo. Hal ini dikarenakan kota Probolinggo sudah mengimplementasikan program bank sampah sejak 2015 sehingga peneliti ingin mengetahui perkembangan dari pencapaian bank sampah melalui lembaga terkait sebagai induk serta bank sampah unit di kota Probolinggo.

Selain itu juga, tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang menjadi objek maupun subjek program bank sampah, peneliti juga meneliti di bank sampah Srikandi yang dinilai sukses dalam memberdayakan masyarakat dan mencapai harapan didirikannya bank sampah.

2. Pelaku

Interaksi pelaku atau aktor dalam kegiatan penelitian kualitatif perlu dicermati dengan baik, sebab dari sinilah peneliti akan memperoleh

data yang diharapkan dapat menjawab masalah yang tengah dipecahkannya. Interaksi aktor atau subjek penelitian menurut Amirin (dalam Idrus, 2009:91) merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Dalam penelitian kualitatif pelaku/aktor merupakan informan, yaitu orang-orang yang dapat memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitiannya. Pelaku yang terlibat dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Probolinggo;
 - 2) Kepala UPT Pengelolaan Limbah dan Sampah kota Probolinggo sekaligus Kepala bank sampah induk Maspro Mesra;
 - 3) Kepala unit bank sampah beserta tim pengelola bank sampah Srikandi;
3. Aktivitas yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut
- 1) Peneliti melakukan observasi awal berhubungan dengan hasil yang nampak dari adanya bank sampah.
 - 2) Peneliti mengumpulkan informasi baik dengan wawancara maupun meminta data kepada informan tentang pencapaian kinerja program bank sampah hingga saat ini.
 - 3) Peneliti juga meminta data kepada informan antara lain kebijakan yang berlaku terkait bank sampah serta data pendukung lainnya.

3.4 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga peneliti akan memperoleh jawaban-jawaban atas pertanyaannya (Silalahi, 2009:180). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif.

3.4.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi peneliti dalam mengumpulkan data sehingga dalam proses pengumpulan data sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan relevan dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian ini yaitu penjelasan tentang kinerja implementasi program bank

sampah kota Probolinggo terkait pencapaian *output*, *outcome* yang ditimbulkan dengan adanya bank sampah di kota Probolinggo.

3.4.2 Penentuan Informan Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) seorang informan harus menguasai dan memahami objek penelitian yang mampu menjelaskan secara jelas dan rinci terkait masalah penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang diusung peneliti, penelitian ini menggunakan informan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Moleong (2004:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Silalahi (2009:272) "*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel atau informan yang ada pada posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian". Penentuan informan menurut Faisal (1990) dalam Sugiyono (2011:221), sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui;
2. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti;
3. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi;
4. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya;
5. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Dalam ruang lingkup kebijakan publik setidaknya meliputi 3 unsur yaitu pembuat atau penanggungjawab kebijakan, pelaksana kebijakan, dan sasaran kebijakan (*target group*). Peneliti menggunakan sejumlah informan yang dinilai mampu dan memenuhi kriteria sebagai informan mengenai kinerja implementasi program bank sampah di kota Probolinggo yaitu:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;

2. Kepala UPT Pengelolaan Limbah dan Sampah Kota Probolinggo sekaligus Kepala Bank Sampah Induk Maspro Mesra;
3. Kepala unit bank sampah atau tim pengelola bank Sampah Srikandi;

3.4.3 Data dan Sumber Data

Sebuah penelitian, data memegang peranan penting sebagai suatu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Penelitian agar memperoleh hasil yang baik tentunya harus ditunjang oleh data akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti. Data menurut Moleong (2004:112) terbagi dalam beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:

1. Kata-kata dan tindakan, dapat diamati dengan melakukan wawancara atau pengamatan merupakan sumber utama.
2. Sumber Tertulis, dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber data tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.
3. Foto, menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan peneliti untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan, yaitu yang dihasilkan orang dan dihasilkan oleh peneliti (Bogdan dan Biklen, 1982:102 dalam Moleong 2004:114-115).
4. Data Statistik, [eneliti kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber tambahan lainnya. Statistik misalnya dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian.

Menurut Silalahi (2010:23) mendefinisikan data sebagai bahan penting yang digunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara di lapangan.

2. Data Sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder berupa catatan-catatan resmi, laporan-laporan atau dokumen-dokumen serta data pendukung lainnya yang mendukung data primer.

Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh dari observasi atau pengamatan langsung dan penyebaran angket kepada informan terkait dengan kinerja program bank sampah di Kota Probolinggo. Sedangkan data sekunder merupakan sebuah jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data dari Dinas Lingkungan Hidup dan masing bank-bank sampah serta dokumen lain yang nantinya dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24), teknik dan alat perolehan data ialah uraian yang menjelaskan cara dan instrument yang digunakan untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat berupa observasi, dokumentasi, wawancara, dan survei. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, draf wawancara atau alat elektronik. Teknik dan alat pengumpulan digunakan dalam penelitian untuk menggali data-data relevan yang dibutuhkan dalam penelitian. Sesuai dengan definisi dan keterangan mengenai teknik pengumpulan tersebut, peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yang akan dijabarkan, yaitu observasi, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai observer, dan objek yang diobservasi dikenal sebagai observe (W. Gulo, 2002:116). Pada konteks penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati kinerja program bank sampah di Kota Probolinggo melalui kegiatan observasi

pada bank sampah induk dan bank sampah unit Srikandi di kota Probolinggo terkait pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan sampah.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara mewawancarai informan secara langsung. Menurut Usman dan Akbar (2009:55) “Wawancara ialah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”. Pewawancara disebut *interviewer* sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*indepth interview*). Penggunaan *indepth interview* sangat signifikan dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi masing-masing individu yang sedang diteliti. Selanjutnya *indepth interview* terdiri atas wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Menurut Silalahi (2009:313) wawancara terstruktur dan tak terstruktur sebagai berikut.

1. Wawancara terstruktur, memerlukan administrasi dari suatu jadwal wawancara oleh seorang pewawancara. Pewawancara memiliki sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan dia mengadakan wawancara atas dasar atau panduan pertanyaan tersebut.
2. Wawancara tak terstruktur, pewawancara tidak memiliki setting wawancara dengan sekuensi pertanyaan yang direncanakan yang akan ditanyakan pada informan.

Wawancara menurut Silalahi (2009:314) dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu wawancara tatap muka dan telepon.

1. Wawancara tatap muka, wawancara yang dilakukan secara personal antara pewawancara dengan yang diwawancarai.
2. Wawancara melalui telepon, merupakan pembicaraan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan menggunakan telepon sebagai alat.

Metode wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu tipe wawancara terstruktur dengan cara bertatap muka. Hal ini dikarenakan peneliti dapat menjangkau lokasi dan mampu bertemu dengan informan guna memperoleh data yang dibutuhkan. Dengan demikian, peneliti telah dibahas sebelumnya mengenai

penentuan informan berdasarkan kewenangan, kedudukan serta keikutsertaanya pada program bank sampah kota Probolinggo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan (Irawan, 2004: 69). Pada penelitian kualitatif, dokumentasi berguna sebagai penggunaan teknik pengumpulan data dengan observasi maupun wawancara.

Metode dokumentasi dilakukan guna penggalian data sekunder yang diperlukan guna menunjang data primer yang telah diperoleh dari pihak peneliti. Data sekunder didapat melalui cara pengumpulan sumber data yang berasal dari arsip atau dokumen. Dokumen bisa bersifat pribadi maupun resmi, namun pada peneliti menggunakan dokumen resmi yang diperoleh langsung dari tempat penelitian maupun secara online

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menurut Moelong (2015:324) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Adapun teknik pemeriksaan data menurut Moelong sebagai berikut.

1. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti dalam penelitian akan menjadikan peneliti turut menjadi bagian dalam objek penelitian. Hal ini dapat menjadi pendukung bagi keakuratan data.

2. Ketekunan atau kejegan pengamatan

Kejegan pengamatan berarti secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan proses ilmiah yang konsta dan relatif. Kejegan digunakan untuk mencari ciri-ciri khusus yang sangat relevan dengan objek penelitian di lapangan.

3. Tringulasi

Menurut Moelong (2015:330) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi data dalam penelitian ini dikarenakan peneliti menemukan ketidaksesuaian antara data sekunder dan data primer sehingga peneliti melakukan triangulasi data dengan informan untuk memperdalam objek yang diteliti.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hal tersebut guna mensejajarkan dan membandingkan temuan peneliti melalui wawancara informan dengan metode yang digunakannya sehingga menghasilkan tingkat kepercayaan peneliti terhadap penelitian. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah serta masyarakat yang menjadi pengelola bank sampah yaitu Bank Sampah Srikandi. Dengan demikian peneliti dapat memberikan pandangan terkait fokus penelitian oleh informan yang berkompeten dalam memberikan informasi seputar penelitian.

3.7 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data

Teknik penyajian data menurut Usman dan Akbar (2009:85) merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut. Sedangkan analisis data merupakan upaya penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Secara umum teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Penggolongan teknis analisis data ini dilakukan berdasarkan data yang menjadi bahan analisis dalam penelitian. Memperhatikan definisi analisis data diatas, penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan jenis data yang digunakan yaitu statistik inferensial.

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Analisis data menggunakan model interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari

empat hal utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria diantaranya:

1. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dialami dan juga temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses dimana peneliti melakukan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” dari catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasikan data sehingga mudah untuk diperlukan penarikan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi.

3. Penyajian data

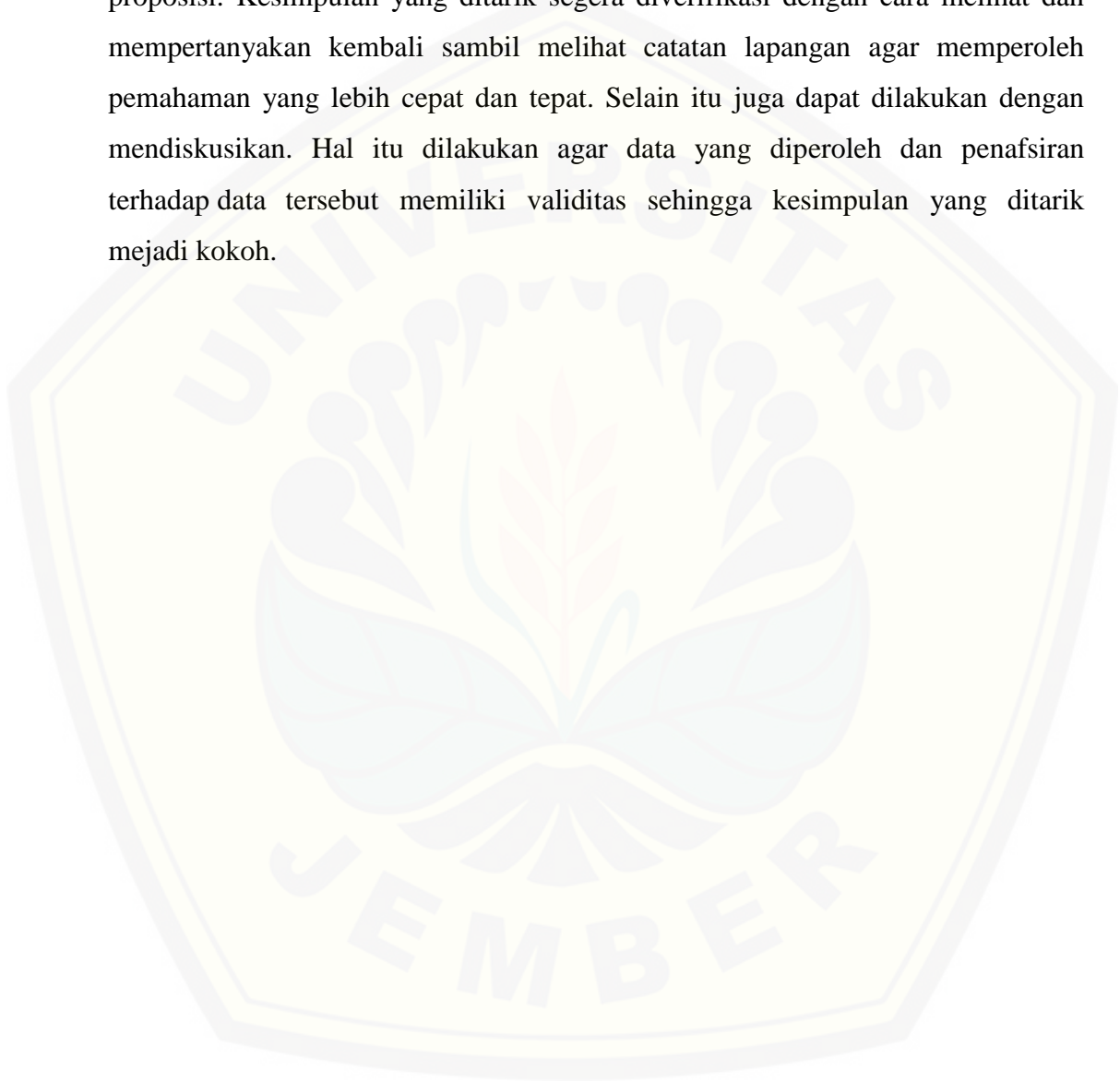
Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data sehingga mudah dipahami (Miles dan Huberman, 2009: 17). Data yang terkumpul dan telah melalui proses reduksi data akan peneliti sajikan dalam bentuk teks yang berisi naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menyangkut intepretasi peneliti, yaitu penggambaran makna dari data yang ditampilkan. Peneliti berupaya mencari makna dari data yang telah dihasilkan dalam penelitian, serta menganalisis data dan kemudian membuat kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan persamaan dan sebagainya antar detail untuk dipelajari kemudian disimpulkan.

Dalam proses penyimpulan data merupakan proses yang membutuhkan suatu pertimbangan yang benar-benar dipertanggungjawabkan.

Tahap penarikan kesimpulan mempunyai maksud usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih cepat dan tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan. Hal itu dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja implementasi program bank sampah kota Probolinggo, sudah dijelaskan pada pembahasan dari segi implementasi program serta capaian bahwa masih butuh pengoptimalan terutama segi *controlling* dan pendampingan. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil atas keluaran dan hasil kebijakan program dengan menggunakan indikator *policy output* dan indikator *policy outcome*, sehingga implementasi program bank sampah sudah mencerminkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan meskipun dari beberapa bank sampah unit masyarakat yang kurang berkembang karena kepentingan dan kesibukan masyarakat yang berbeda disetiap RT/RW.
2. Hasil analisis dengan pendekatan model implementasi, diketahui kinerja implementasi kebijakan program kota Probolinggo yang tidak optimal tersebut dipengaruhi oleh faktor implementor, yang meliputi: sikap Dinas Lingkungan Hidup kurang disiplin melaksanakan wewenang, yang meliputi: fungsi *controlling* dan pendampingan terhadap tingkat partisipasi terkait pengelolaan bank sampah, faktor penerima (*target group*) meliputi: masyarakat kota Probolinggo memiliki perbedaan karakteristik setiap kelurahan sehingga berpengaruh pada tingkat partisipasi berkaitan kegiatan pengelolaan bank sampah unit, faktor sumber daya meliputi: tenaga pengelolaan yang minim dari beberapa bank sampah unit mengakibatkan kurang berkembang atau berstatus tidak aktif, dan lemahnya permintaan pasar terhadap produk hasil bank sampah kecuali bank sampah Srikandi yang mampu berinovasi melalui daur ulang.
3. Faktor yang paling dominan pendukung dari kinerja implementasi program bank sampah di kota Probolinggo adalah faktor layanan *mobile*

service berupa *SMS Gateway* dan *call center* yang diterapkan bank sampah induk Maspro Mesra dalam memberikan kesan efektif dan efisien kepada nasabah bank sampahnya. Faktor dominan yang menghambat kinerja implementasi program bank sampah kota Probolinggo yaitu faktor penerima atau *target group* yang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak semua masyarakat cocok dengan program bank sampah yang mengakibatkan terbatas dalam tenaga pengelola bank sampah unit.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran yang dirasa perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kedisiplinan terkait wewenang guna mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan sistem *control* serta pendampingan dalam rangka pengembangan bank sampah unit masyarakat, agar masyarakat merasa diperhatikan dan diberdayakan dalam program bank sampah guna rangka pelestarian lingkungan. Pada dasarnya juga partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam pencapaian program bank sampah, patutnya perlu diberi pendampingan serta arahan agar terciptanya potensi yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Meningkatkan peran serta dari masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan sampah agar masyarakat memiliki edukasi seputar bank sampah. Dinas Lingkungan Hidup kota Probolinggo melalui UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah beserta mitra kerjanya Paguyuban Peduli Sampah (PAPESA), perlu meningkatkan kegiatan tersebut agar terciptanya bank sampah-bank sampah unit baru yang tersebar di masyarakat sehingga mampu mengupayakan pencapaian program bank sampah. Hal tersebut guna menciptakan potensi dampak dan manfaat yang sejatinya dihasilkan oleh bank sampah meliputi pemberdayaan masyarakat, ekonomi kemasyarakatan, dan lingkungan yang bersih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anonim, 2015. *Profil Kota Probolinggo tahun 2015*. Probolinggo: Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Probolinggo.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik: Kerangka Analisis & Prosedur Perumusan Masalah*. Yogyakarta: Hanindita.
- Gulo. W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo Indonesia.
- Gelbert M, Prihanto D, dan Suprihatin A, 1996. *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup. Malang: PPPGT/VEDC.
- Idrus, Muhammad (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Irawan, Prasetya. 2004. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: Hanke, John E. et. All.
- Khaeruddin. (1992). *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi Dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, Matthew B. dan A. Micheael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbita Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.

- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Publik Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2017. *Publik Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Etika Kebijakan, Kimia Kebijakan)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwendro, D. dan Nurhidayat T. 2007. *Pembuatan Pupuk Cair*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ridley, Duff dan Bull. 2011. *Understanding Social Enterprise: Theory and Practice*. London: SAGE Publication.
- Ripley, Randall B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson-Hall Publiser.
- Satori, A dan Komariah D. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Saifuddin. 2014. *Pengelolaan Pembelajaran secara Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugandhy, A et al. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwerda, Bambang. 2012. *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan)*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.

Tchobanoglous, G., et al. 1993. *Integrated Solid Waste Management*. New York: McGrawHill.

Usman, Hundaeni dan P. S. Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian*. Edisi ke-2. Cetakan ke-3. Jakarta: Bumi Aksara.

Winardi. 1990. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Bandung : Mandar Maju.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta Media Presindo

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*. Yogyakarta: CAPS.

Buku Lembaga

Tim Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup. 2018. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2018*. Badan Pusat Statistik

Tim Badan Pusat Statistik kota Probolinggo. 2018. *Kota Probolinggo dalam angka tahun 2018*. Probolinggo: CV. Azka Putra Pratama

Tim Universitas Jember. 2012. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember

Buku Dinas/Intansi

Tim UPT. Pengelolaan Sampah dan Limbah. 2018. *Profil Bank Sampah Maspre Mesra 2018*. Probolinggo: Dinas Lingkungan Hidup kota Probolinggo

Tim UPT. Pengelolaan Sampah dan Limbah. 2019. *Profil Persampahan 2019*. Probolinggo: Dinas Lingkungan Hidup kota Probolinggo

Jurnal Ilmiah

Asteria, D dan Heruman, H. 2016. *Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Prayati, N dan Kartika, I. 2018. Analisis Pengaruh Program Bank Sampah Terhadap Pendapatan Nasabah Bank Sampah di Kota Denpasar. Denpasar: Universitas Udayana, Vol 7 halaman 1258-1261.

Shentika, P. Ambar. 2016. Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo. Malang: Universitas Negeri Malang Fakultas Ekonomi, Vol 8

Produk Hukum

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Presiden No 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012. tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah

Peraturan daerah kota Probolinggo nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

Surat Keputusan Walikota Probolinggo nomor 39 tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Pelayanan Bank Sampah Kota

Skripsi

Fariqi, Muhammad. 2016. *Partisipasi Anggota Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah RW 03 Kelurahan Badean Kabupaten Bondowoso Skripsi*. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Jahro, Siti. 2018. *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Jogosari dan Desa Pleret Kabupaten Pasuruan Skripsi*. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Muhfida, Erlina. 2018. *Pengembangan Masyarakat melalui Paguyuban Peduli Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo*. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Website

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425101643-282-293362/riset-24-persen-sampah-di-indonesia-masih-tak-terkelola> (diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 19.12 WIB)

<https://news.detik.com/berita/d-4328876/klhk-sebut-bank-sampah-beri-pendapatan-rata-rata-1-m-per-tahun> (diakses pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 21.39 WIB)



LAMPIRAN

Lampiran 6.1 Wawancara kepada Informan (Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Probolinggo beserta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah)



Lampiran 6.2 Observasi bank sampah induk Maspro Mesra kota Probolinggo





Lampiran 6.3 Tabungan Bank Sampah Kota Maspro Mesra





Lampiran 6.4 Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Daur Ulang UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah bersama Paguyuban Peduli Sampah yang ditujukan ibu-ibu Rumah Tangga



Lampiran 6.5 Wawancara bersama Pengelola sekaligus Pengrajin Bank Sampah Srikandi




Lampiran 6.6 Buku catatan nasabah bank sampah unit Srikandi

No	Nama	Januari	Maret	Juni	September
1	B. Aep	5000	-	10.000	-
2	B. Slamet	5000	5000	-	10.000
3	B. Parlau	5000	10.000	8.000	20.000
4	B. Madhu	2000	5000	8.000	-
5	B. Windarti	2000	15.000	-	-
6	B. Bomo	2000	-	8.000	-
7	B. Edi	2000	-	10.000	-
8	B. Purjiana	2000	-	13.000	-
9	B. Agung	5000	-	-	-
10	B. Ila	5000	-	-	5.000
11	B. Haru P (Bd RW)	2000	10.000	5.000	-
12	B. Sumari	2000	7.000	-	-
13	B. Agus Ir	2000	-	6.000	-
14	B. Agus P	2000	-	7.000	-
15	B. Sumah	2000	5.000	10.000	5.000
16	B. Sniwahyu Mingsih	2500	15.000	13.000	-
17	B. Bambi	-	10.000	-	-
18	B. Achyano	-	4.000	-	12.000
19	B. Ilesan	-	4.000	4.500	9.000
20	B. Dwi	-	5.000	10.000	15.000
21	B. Fayakun	-	6.000	-	21.000
22	B. Ferdy	-	3.000	5.000	-
23	B. Eko	-	4.000	10.000	-
24	B. Dibat	-	5.000	12.000	-
25	B. Sulpriyono	-	10.000	-	-
26	B. Ali	-	2.500	-	5.000
27	B. Dibat	-	10.000	-	6.000
28	B. Tunwan	-	5.000	-	-
29	B. Anbi	-	5.000	20.000	-
30	B. Hamis	-	4.000	-	-

Lampiran 6.7 Observasi Produk Daur Ulang Bank Sampah Srikandi



Lampiran 6.8 Surat Izin Usaha Perdagangan Bank Sampah Srikandi


	PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Basuki Rahmad No. 44 Telp. (0335) 428990 Fax. (0335) 430758 Web site : http://www.pelayananperijinan.probolinggokota.go.id Email : badanpelayananperijinan@yahoo.co.id PROBOLINGGO - 67217
	PERUBAHAN
<u>SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO</u> Nomor : 517.1 / 224 / 425.117 / 2017	

NAMA PERUSAHAAN	: SRIKANDI, UD	
NAMA PENANGGUNG JAWAB	: KATARINA SUHENDAR TRININGRUM, STP	
ALAMAT PENANGGUNG JAWAB	: PERUM KOPIAN BARAT E / 23 RT. 004 RW. 005 KEL. KETAPANG KEC. KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO.	
ALAMAT PERUSAHAAN	: PERUM KOPIAN BARAT E / 23 RT. 004 RW. 005 : KEL. KETAPANG KEC. KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO.	
NOMOR TELEPON	: 085235702342	FAX : -
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)	: 84.375.502.6-625.000	
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp. 50.000.000,-	
KELEMBAGAAN	: PEDAGANG PENGECEK	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: 8549, 4771.	
BARANG/ JASA DAGANGAN UTAMA	: BATIK TULIS, KONVEKSI (SERAGAM DINAS, OLAHRAGA), PRODUK DAUR ULANG (TAS, SEPATU, SOVENIR), TAS APLIKASI, DECOUPAGE, ALAT DAN BAHAN PELATIHAN (BATIK, DECOLIPAGE, DAUR ULANG).	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.		

Dikeluarkan di : **PROBOLINGGO**
 Pada tanggal : **19 OKTOBER 2017**

a.n. **WALIKOTA PROBOLINGGO**
Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





ACER ARIEF HIDAYAT, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19571021 198103 1 004

Lampiran 6.9 Observasi Kampung Tematik Daur Ulang “ReReRe”, Lokasi Bank Sampah Srikandi



Lampiran 6.10 Draft wawancara

Pedoman Wawancara I

Bagi Penanggungjawab Pelaksana Program Bank Sampah

(Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo)

1. Apakah program bank sampah sudah diterapkan di Kota Probolinggo?
2. Apa tujuan dari program bank sampah di Kota Probolinggo?
3. Bagaimana awal mula penerapan bank sampah di Kota Probolinggo?
4. Siapa yang menjadi pelaksana bank sampah di Kota Probolinggo?
5. Apakah terjadi perubahan kondisi masyarakat serta lingkungannya setelah adanya penerapan bank sampah?
6. Apakah penerapan bank sampah dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat?
7. Apakah dengan adanya bank sampah masyarakat sudah bisa lebih mandiri dalam pengelolaan sampah?
8. Apakah terjadi kendala dalam penerapan bank sampah di Kota Probolinggo maupun unit bank sampah?
9. Selain kendala, apa keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampak (*impact*) dari bank sampah Kota Probolinggo?
10. Apakah ada peningkatan di sektor pendapatan atau pemasukan bulanan dari warga merupakan anggota/nasabah bank sampah?
11. Apa langkah/usaha kedepan dalam peningkatan kinerja dari bank sampah di Kota Probolinggo?
12. Apakah bank sampah menjadi prioritas dalam ajang program pelestarian lingkungan tingkat Kota/Kabupaten (Adipura)?

Pedoman Wawancara II

Bagi Pelaksana Program Bank Sampah

(UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dan Bank Sampah Maspro Mesra)

1. Apakah program bank sampah sudah diterapkan di Kota Probolinggo?
2. Ada berapa unit bank sampah di Kota Probolinggo yang beroperasi dan dinaungi UPT PLS?
3. Bagaimana awal mula penerapan bank sampah di Kota Probolinggo?
4. Siapa yang menjadi pelaksana bank sampah di Kota Probolinggo?
5. Apakah terjadi perubahan kondisi masyarakat serta lingkungannya setelah adanya penerapan bank sampah?
6. Apakah penerapan bank sampah dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat?
7. Apakah dengan adanya bank sampah masyarakat sudah bisa lebih mandiri dalam pengelolaan sampah?
8. Apakah terjadi kendala dalam penerapan bank sampah di Kota Probolinggo maupun unit bank sampah?
9. Selain kendala, apa keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampak (*impact*) dari bank sampah Kota Probolinggo?
10. Apakah ada peningkatan di sektor pendapatan atau pemasukan bulanan dari warga merupakan anggota/nasabah bank sampah?
11. Apa langkah/usaha kedepan dalam peningkatan kinerja dari bank sampah di Kota Probolinggo?
12. Apakah bank sampah menjadi prioritas dalam ajang program pelestarian lingkungan tingkat Kota/Kabupaten (Adipura)?

Pedoman Wawancara III

Bagi Sasaran Program Bank Sampah

(Masyarakat Pelaksana Program dan Anggota Nasabah)

1. Mulai sejak kapan berdirinya unit bank sampah?
2. Bagaimana awal mula penerapan bank sampah?
3. Siapa yang menjadi pelaksana bank sampah tersebut?
4. Apakah terjadi perubahan kondisi masyarakat serta lingkungannya setelah adanya penerapan bank sampah?
5. Apakah penerapan bank sampah dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat?
6. Apakah dengan adanya bank sampah masyarakat sudah bisa lebih mandiri dalam pengelolaan sampah?
7. Apakah terjadi kendala dalam penerapan bank sampah tersebut?
8. Selain kendala, apa keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampak (*impact*) dari bank sampah?
9. Apakah ada peningkatan di sektor pendapatan atau pemasukan bulanan terhadap warga merupakan anggota/nasabah bank sampah?
10. Apa langkah/usaha kedepan dalam peningkatan kinerja dari bank sampah tersebut?

Lampiran 6.11 Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
 Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 2011 /UN25.3.1/LT/2019
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

25 Juni 2019

Yth. Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Probolinggo
 Di
 Probolinggo

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 2059/UN25.1.2/LT/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Muktiar Reza Kumara Putra
 NIM : 150910201042
 Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Jl. Nias II No.5 Sumbersari-Jember
 Judul Penelitian : "Kinerja Program Bank Sampah Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kota Probolinggo"
 Lokasi Penelitian : 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo
 2. UPT PLS Kota Probolinggo
 3. Bank Sampah Kota Probolinggo
 Lama Penelitian : 3 Bulan (1 Juli-30 September 2019)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Ketua
 Sekretaris II,

Dr. Susanto, M.Pd.
 NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth.
 1. Kepala DLH Kota Probolinggo;
 2. Kepala UPT PLS Kota Probolinggo;
 3. Pengelola Bank Sampah Kota Probolinggo;
 4. Dekan FISIP Universitas Jember;
 5. Mahasiswa ybs; ✓
 6. Arsip.



Lampiran 6.12 Surat Izin Penelitian dari Sos. Pol Tingkat II (kota Probolinggo)

	PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jalan Mawar No. 39A Telp./Fax. (0335) 426 436 PROBOLINGGO 67219 e-mail : bakesbang_kotaprobolinggo@yahoo.co.id	
	REKOMENDASI PENELITIAN NOMOR : 072/1068 /425.206/2019	
Dasar :	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014; 4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;	
Menimbang :	a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian; b. bahwa sesuai Surat dari Sekretaris II Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember Nomor : 2011/UN25.3.1/LT/2019 Tanggal 25 Juni 2019 Hal: Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian ; c. bahwa sesuai huruf a dan b serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014;	
Walikota Probolinggo, Memberikan Rekomendasi kepada:		
a. Nama/ NIM :	MUKTIAR REZA KUMARA PUTRA / 150910201042	
b. Alamat :	Jl Mastrip Gg 3 RT/RW 004/013 Kel/Desa Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo	
c. Pekerjaan/Jabatan :	Mahasiswa	
d. Instansi/Civitas/ Organisasi :	Universitas Jember	
e. Kebangsaan :	Indonesia	
Untuk mengadakan penelitian/Survey/research dengan:		
a. Judul :	Kinerja Program Bank Sampah Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kota Probolinggo	
b. Bidang Penelitian :	Lingkungan	
c. Tujuan :	Mencari Data dan Penelitian	
d. Status Peneliti :	Mandiri	
e. Tanggal (Waktu) :	3(tiga) bulan 03 Juli s/d 30 September 2019	
f. Tempat :	1. Dinas Lingkungan Hidup Probolinggo 2. UPT Pengelolah Sampah dan Limbah Kota Probolinggo 3. Bank Sampah Kota Probolinggo	
Dengan Ketentuan :	1. Peneliti wajib melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian Sektor setempat dalam waktu 1 x 24 jam; 2. Wajib menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam daerah setempat serta menghindari hal – hal yang dapat melukai / menyinggung dan menghina martabat, agama, etnis seseorang atau golongan; 3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan lain diluar tujuan penelitian;	

4. Selesai melaksanakan penelitian diwajibkan melapor kepada Pejabat Instansi setempat sebelum meninggalkan tempat penelitian;
5. Dalam jangka waktu satu bulan setelah dilakukannya penelitian, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Walikota Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Rekomendasi Penelitian ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 02 Juli 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PROBOLINGGO



Drs. TEGUH BAGUS S, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660605 199003 1 015

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Probolinggo (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala DLH Kota Probolinggo;
3. Sdr. Kepala UPT PSL Kota Probolinggo;
4. Sdr. Camat Mayangan Kota Probolinggo;
5. Sdr. Kepala Polsek Mayangan Kota Probolinggo;
6. Sdr. Yang bersangkutan.

Lampiran 6.13 Produk Hukum Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah
(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 13 tahun 2012)



SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE*, *REUSE*, DAN *RECYCLE* MELALUI BANK
SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE*, *REUSE*, DAN *RECYCLE* MELALUI BANK SAMPAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
2. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
3. *Extended Producer Responsibility* yang selanjutnya disingkat EPR adalah strategi yang didisain dalam upaya mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam seluruh proses produksi suatu barang sampai produk itu tidak dapat dipakai lagi sehingga biaya lingkungan menjadi bagian dari komponen harga pasar produk tersebut.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Menteri terkait lainnya adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lain yang terkait dengan pengelolaan sampah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan 3R melalui bank sampah.
- (2) Kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan bank sampah;
- b. mekanisme kerja bank sampah;
- c. pelaksanaan bank sampah; dan
- d. Pelaksana bank sampah.

Pasal 4

- (1) Persyaratan bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit meliputi persyaratan:
 - a. konstruksi bangunan; dan
 - b. sistem manajemen bank sampah.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai persyaratan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Mekanisme kerja bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. pemilahan sampah;
- b. penyerahan sampah ke bank sampah;
- c. penimbangan sampah;
- d. pencatatan;
- e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
- f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. penetapan jam kerja;
 - b. penarikan tabungan;
 - c. peminjaman uang;
 - d. buku tabungan;
 - e. jasa penjemputan sampah;
 - f. jenis tabungan;
 - g. jenis sampah;
 - h. penetapan harga;
 - i. kondisi sampah;
 - j. berat minimum;
 - k. wadah sampah;

- l. sistem bagi hasil; dan
 - m. pemberian upah karyawan.
- (2) Tata cara pelaksanaan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kegiatan 3R melalui bank sampah dilaksanakan oleh:
- a. Menteri;
 - b. menteri terkait lainnya;
 - c. gubernur;
 - d. bupati/walikota; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh Menteri dan menteri terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
- a. pembinaan teknis;
 - b. pembangunan bank sampah percontohan;
 - c. pengintegrasian antara bank sampah dengan penerapan EPR;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah di daerah; dan
 - e. pengembangan kerjasama internasional dalam pelaksanaan bank sampah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi:
- a. memperbanyak bank sampah;
 - b. pendampingan dan bantuan teknis;
 - c. pelatihan;
 - d. monitoring dan evaluasi bank sampah; dan
 - e. membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.
- (4) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pemilahan sampah;
 - b. pengumpulan sampah;
 - c. penyerahan ke bank sampah; dan
 - d. memperbanyak bank sampah.
- (5) Pengintegrasian antara bank sampah dengan penerapan EPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Lampiran 6.14 Surat Keputusan Tim Pelaksanaan Bank Sampah Induk “Maspro Mesra”



PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 188.45/39/KEP/425.012/2015
TENTANG
TIM PELAKSANA PELAYANAN BANK SAMPAH KOTA
“MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO MENUJU SEJAHTERA”

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang mempunyai nilai ekonomis dengan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), perlu dibentuk suatu pelayanan pengelolaan yang menangani sampah organik dan anorganik guna menambah nilai ekonomis;

b. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pengelolaan sampah organik dan anorganik perlu dibentuk Bank Sampah;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Bank Sampah Kota “Masyarakat Kota Probolinggo Menuju Sejahtera” yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Recycle* melalui Bank Sampah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 13);
14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 3);

15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 30);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 29);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Bank Sampah Kota "Masyarakat Kota Probolinggo Menuju Sejahtera" dengan susunan keanggotaan dan kerangka acuan kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat dan bank sampah unit (skala kelurahan) dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik;
- b. melakukan pendampingan kepada Paguyuban Peduli Sampah (PAPESA) sebagai wadah paguyuban dalam pengolahan sampah organik dan anorganik;
- c. melakukan koordinasi aktif dengan seluruh SKPD sebagai upaya penguatan pembentukan bank sampah di SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- d. memberikan dukungan sarana dan penguatan SDM kelembagaan pada kelompok masyarakat dan bank sampah unit
- e. melaksanakan layanan teknis berupa pengambilan, penimbangan, penjualan dan evaluasi harga sampah organik dan anorganik; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan secara hirarki melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo kepada Ibu Walikota Probolinggo.

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pos Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Januari 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Hj. RUKMINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si
NIP. 19660805 198602 1 002

SALINAN LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR : 188.45/39/KEP/425.012/2015
 TANGGAL : 23 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PELAKSANA PELAYANAN BANK SAMPAH KOTA
 "MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO MENUJU SEJAHTERA"

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Walikota Probolinggo;
2.	Pengarah	Wakil Walikota Probolinggo;
3.	Ketua	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
4.	Wakil Ketua	Kepala UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah pada Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
5.	Sekretaris	Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah pada Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
6.	Koordinator Wilayah	Camat Se-Kota Probolinggo;
7.	Anggota Bank Sampah	a. Lurah Se-Kota Probolinggo; b. Bank Sampah Unit Se-Kota Probolinggo;
8.	Anggota Seksi Administrasi Bank Sampah	Staf UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah pada Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
9.	Anggota Seksi Lapangan Bank Sampah	Staf UPT. Pengolahan Sampah dan Limbah pada Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;

WALIKOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 Hj. RUKMINI